

Katalog: 4102004.51
ISSN 2654-6639

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI BALI 2023

Volume 8, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Katalog: 4102004.51
ISSN 2654-6639

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI BALI 2023

Volume 8, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**



Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023

Volume 8, 2023

Katalog : 4102004.51
ISSN : 2654-6639
Nomor Publikasi : 51000.23049

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi+71 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Pembuat Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
Dicetak oleh :

Sumber Ilustrasi : freepik.com, unsplash.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.



TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023

Volume 8, 2023

Pengarah:

Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si., M.M.

Penanggung Jawab:

Ni Nyoman Jegeg Puspadewi, SST., M.M.

Penyunting:

Ni Luh Putu Dewi Kusumawati, SST., M.Si.

Penulis Naskah:

Panca Dwi Prabawa, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Panca Dwi Prabawa, S.Tr.Stat.
I Gusti Ngurah Yogi Sedana Nugraha

Penata Letak:

Panca Dwi Prabawa, S.Tr.Stat.

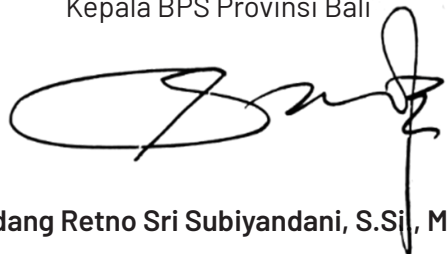
KATA PENGANTAR

Manusia merupakan subjek dan tujuan akhir dari pembangunan. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya saing, taraf hidup, keamanan, dan lainnya. Dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, diperlukan berbagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian dari pembangunan itu sendiri.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023” merupakan publikasi yang menyajikan indikator-indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud. Indikator yang dirangkum dalam publikasi ini disajikan dalam delapan bidang antara lain kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya. Data yang digunakan bersumber dari data yang dihasilkan oleh BPS, serta data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah lainnya.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan makna dan manfaat untuk semua pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Denpasar, November 2023
Kepala BPS Provinsi Bali



Endang Retno Sri Subiyandani, S.Si, M.M.



DAFTAR ISI

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023

Volume 8, 2023

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Maklumat	xv
1 Kependudukan	
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	2
Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
Beban Ketergantungan Penduduk	7
Fertilitas	9
Usia Perkawinan dan Kelahiran Pertama	10
Penggunaan Alat/Cara Kontrasepsi	11
2 Kesehatan dan Gizi	
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	13
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	18
Gizi dan Imunisasi Anak	20
3 Pendidikan	
Angka Melek Huruf	23
Rata-Rata Lama Sekolah	25
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	27
Tingkat Partisipasi Sekolah	28
Kualitas Pelayanan Pendidikan	30
4 Ketenagakerjaan	
Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran	33
Pengangguran dan Pendidikan	35
Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	36
Jumlah Jam Kerja	39
5 Taraf dan Pola Konsumsi	
Rata-rata Pengeluaran Penduduk	41
Distribusi Pendapatan Penduduk	44
Konsumsi Energi dan Protein	45



6 Perumahan dan Lingkungan

Kriteria Rumah Layak Huni	49
Fasilitas Perumahan yang Dimiliki	52
Status Kepemilikan Tempat Tinggal	53

7 Kemiskinan

Perkembangan Penduduk Miskin	57
Kemiskinan Kabupaten/Kota	60
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	61

8 Sosial Lainnya

Akses terhadap Perlindungan Sosial	63
Akses Terhadap Informasi dan Komunikasi	66
Korban Tindak Kejahatan	68

Daftar Pustaka	71
-----------------------------	-----------

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (ribu jiwa), 2021–2023	2
Tabel 1.2	Persentase Perempuan yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Provinsi Bali, 2020–2022	12
Tabel 2.1	Baduta/Balita yang Mendapatkan ASI dan Imunisasi di Provinsi Bali, 2021–2022	20
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021–2022	29
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021–2022	29
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bangunan Tempat Tinggal yang Paling Banyak Digunakan, dan Kecukupan Luas Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2022	51
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Perumahan di Provinsi Bali, 2020–2022	52
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bantuan Sosial di Provinsi Bali, 2022	65
Tabel 8.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bali, 2022	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali, 1961–2020	3
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2023	4
Gambar 1.3	Piramida Penduduk Provinsi Bali (ribu jiwa), 2023	5
Gambar 1.4	Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2023	6
Gambar 1.5	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (jiwa per km ²), 2022–2023	6
Gambar 1.6	Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022–2023	8
Gambar 1.7	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dan <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR) 15–19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022	9
Gambar 1.8	Persentase Perempuan yang Umur Perkawinan Pertama dan yang Umur Saat Hamil Pertama Kurang dari 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022	11
Gambar 2.1	Umur Harapan Hidup Provinsi Bali dan Indonesia (tahun), 2010–2022	14
Gambar 2.2	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (tahun), 2022	14
Gambar 2.3	<i>Infant Mortality Rate</i> (IMR), <i>Child Mortality Rate</i> (CMR), dan <i>Under-5 Mortality Rate</i> (U5MR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022	15
Gambar 2.4	Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021–2022	16
Gambar 2.5	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan atau yang Tidak Berobat Jalan karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022	17
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Bali, 2021–2022	18
Gambar 2.7	Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Bali, 2021–2022	19

Gambar 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2020-2022	24
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2022	25
Gambar 3.3	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali (tahun), 2018-2022	26
Gambar 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (tahun), 2021-2022	26
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2021-2022	27
Gambar 3.6	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jumlah Perguruan Tinggi di Provinsi Bali, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023	30
Gambar 3.7	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Rasio Mahasiswa-Tenaga Pendidik di Provinsi Bali, Tahun Ajaran 2018/2019 s.d. 2022/2023	31
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021-2023	34
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali (persen), 2021-2023	35
Gambar 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Bali (persen), 2021-2023	36
Gambar 4.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lima Lapangan Usaha Terbesar di Provinsi Bali, 2021-2023	37
Gambar 4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Formal-Informal di Provinsi Bali, 2021-2023	38
Gambar 4.6	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali, 2021-2023	38
Gambar 4.7	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Bali, 2021-2023	40
Gambar 5.1	Pengeluaran per Kapita dan Distribusinya Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2018-2022	42
Gambar 5.2	Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota dan Distribusi Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2022	43
Gambar 5.3	Distribusi Pendapatan Provinsi Bali, 2021-2023	44
Gambar 5.4	Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022	45

Gambar 5.5	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Bali, 2018-2022	46
Gambar 5.6	Persentase Konsumsi Energi per Kapita Menurut Sumber Energi di Provinsi Bali, 2022	47
Gambar 5.7	Persentase Konsumsi Protein per Kapita Menurut Sumber Protein di Provinsi Bali, 2022	47
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Kriteria Rumah Layak Huni di Provinsi Bali, 2020-2022	50
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2020-2022	54
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Milik Sendiri di Provinsi Bali, 2021-2022	54
Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali, 2019-2023	58
Gambar 7.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023	58
Gambar 7.3	Garis Kemiskinan Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2021-2023	59
Gambar 7.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021-2022	60
Gambar 7.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023	62
Gambar 7.6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023	62
Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Menurut Jenis Bantuan Sosial di Provinsi Bali, 2020-2022	64
Gambar 8.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bali, 2020-2022	66
Gambar 8.3	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2020-2022	68

MAKLUMAT

Selain publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023, telah diterbitkan juga publikasi **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2022**.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2022 menampilkan data dalam bentuk tabel statistik dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2023 menyajikan analisis lanjutan dari publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali 2022, dengan dilengkapi data dan indikator lainnya dari berbagai sumber.

Kependudukan

Seperti sebuah adagium, membangun tanpa data, bagai menyusuri jalan tanpa kompas, atau menyusuri malam tanpa lentera. Data begitu penting dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai pengendalian pembangunan. Terlebih bahwa pembangunan dewasa ini dilakukan dengan paradigma desentralisasi, atau dengan kata lain lebih menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Untuk itu, pembangunan yang berkualitas tentu memerlukan data yang berkualitas.

Manusia merupakan modal utama pembangunan untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, satu dari tujuh Agenda Strategis Pembangunan adalah untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Tentu, dalam mewujudkan hal tersebut, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan adalah menjadi salah satu aspek utama yang perlu mendapatkan perhatian bersama.

Data kependudukan merupakan salah satu data strategis yang dibutuhkan dalam pembangunan. Data mengenai jumlah, distribusi, komposisi, dan karakteristik penduduk tidak hanya penting dalam proses pembangunan, tetapi juga dalam mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Salah satu contoh aspek kependudukan yang penting adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh padatnya penduduk adalah kemiskinan, pengangguran, perumahan, lingkungan, dan lain-lain. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat suatu wilayah (Christiani dkk., 2014).

Harus disadari bahwa pembangunan di bidang kependudukan tidaklah mudah. Jika tidak dibarengi dengan pengendalian dan peningkatan kualitas, tentu akan menjadi beban dalam pembangunan. Dalam uraian selanjutnya, akan membahas sejumlah data yang terkait dengan kependudukan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa yang tersebar di 34 provinsi. Penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana sekitar 56 persen penduduk mendiami pulau tersebut. Sedangkan, penduduk Bali tidak lebih dari dua persen dari penduduk Indonesia. Namun, kepadatan penduduk di Bali menjadi salah satu yang tertinggi selain provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan data proyeksi penduduk hasil SP2020, jumlah penduduk Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,40 juta jiwa. Jumlah penduduk Bali meningkat hampir dua kali lipat selama empat dekade lebih, di mana pada SP1980, jumlah penduduk Bali tercatat hanya sebesar 2,47 juta jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Buleleng yang tercatat sebesar 808,9 ribu jiwa, sedangkan jumlah terendah berada di Kabupaten Bangli.

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (ribu jiwa), 2021–2023

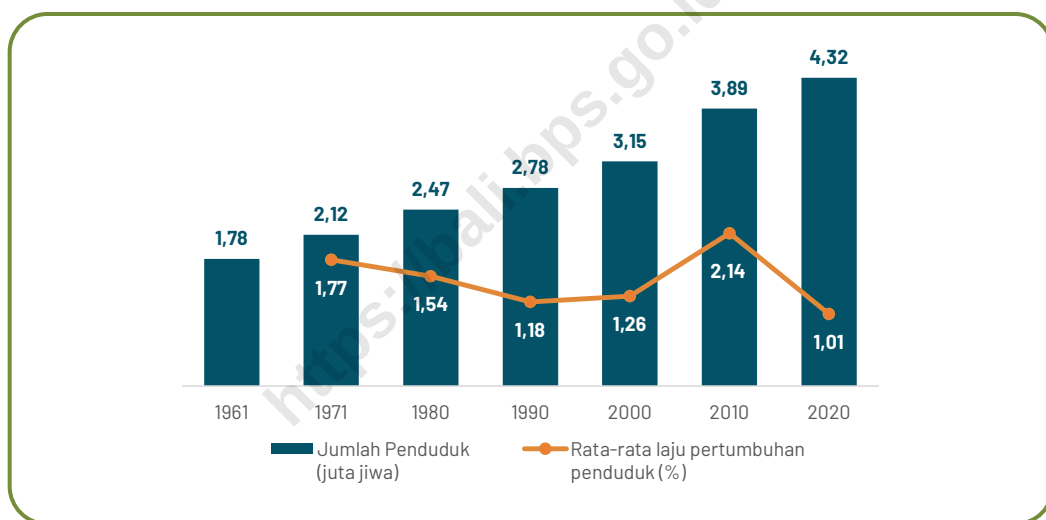
Kabupaten/ Kota	2021			2022			2023		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jembrana	159,6	159,2	319,0	160,8	160,3	321,2	162,0	161,5	323,5
Tabanan	231,7	231,2	463,0	232,1	232,4	464,5	232,5	233,6	466,1
Badung	277,0	275,8	553,0	279,7	278,4	558,1	282,4	281,0	563,3
Gianyar	259,2	258,5	518,0	260,3	260,6	520,9	261,4	262,7	524,0
Klungkung	103,9	103,4	207,0	104,3	103,7	208,1	104,7	104,0	208,7
Bangli	130,6	128,7	259,0	131,1	129,3	260,4	131,6	129,8	261,4
Karangasem	249,9	245,0	495,0	250,5	247,0	497,5	251,1	248,9	500,0
Buleleng	400,3	396,1	796,0	403,3	399,4	802,8	406,2	402,7	808,9
Denpasar	370,4	362,9	733,0	374,3	366,7	741,0	378,1	370,3	748,4
Provinsi Bali	2.182,6	2.160,8	4.343,5	2.196,5	2.177,9	4.374,3	2.209,7	2.194,5	4.404,3

Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020–2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Laju pertumbuhan penduduk Bali per tahun selama periode 1961–1971 tercatat sebesar 1,77 persen. Laju tersebut persisten mengalami perlambatan pada periode setelahnya. Penurunan laju pertumbuhan penduduk terus diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan pengendalian penduduk, salah satunya melalui Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Memasuki periode tahun 1990–2000, laju pertumbuhan penduduk Bali mengalami peningkatan menjadi 1,26 persen per tahun, dan

meningkat kembali pada periode 2000-2010 menjadi sebesar 2,14 persen. Berdasarkan hasil SP2020, laju pertumbuhan penduduk Bali pada periode tahun 2010-2020 kembali mengalami perlambatan dan menjadi sebesar 1,01 persen per tahun. Melambatnya laju pertumbuhan penduduk ini tidak lepas dari kondisi bahwa pelaksanaan SP2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya fenomena migrasi kembali dari para penduduk perantau untuk pulang ke daerah asalnya karena berbagai dampak buruk pandemi yang memaksa mereka untuk keluar dari Bali. Migrasi risen neto Bali untuk pertama kalinya bernilai negatif, yang berarti lebih banyak penduduk yang bermigrasi keluar dibandingkan yang migrasi masuk (BPS Provinsi Bali, 2023).

Gambar 1.1 Jumlah dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bali, 1961-2020



Sumber: BPS Provinsi Bali, Sensus Penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020

Dalam melakukan pengembangan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, dibutuhkan suatu indikator demografi yang disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Rasio jenis kelamin digunakan untuk melihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Terlihat pada Gambar 1.2, rasio jenis kelamin di Bali pada tahun 2023 sebesar 100,69. Angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Bali terdapat 101 penduduk laki-laki. Kota Denpasar merupakan wilayah dengan rasio jenis kelamin tertinggi di Bali. Artinya, jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dan perbedaannya paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Sementara itu, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan memiliki rasio

jenis kelamin yang bernilai kurang dari 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di kabupaten ini lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kota Denpasar memiliki rasio jenis kelamin terbesar dapat dijelaskan bahwa Kota Denpasar merupakan pusat perekonomian di Bali sehingga menarik penduduk khususnya laki-laki untuk merantau dan tinggal. Berdasarkan hasil *Long Form* SP2020, penduduk pendatang yang bermigrasi ke Bali mayoritas menuju Kota Denpasar, dengan alasan yang berkaitan dengan pekerjaan (BPS Provinsi Bali, 2023).

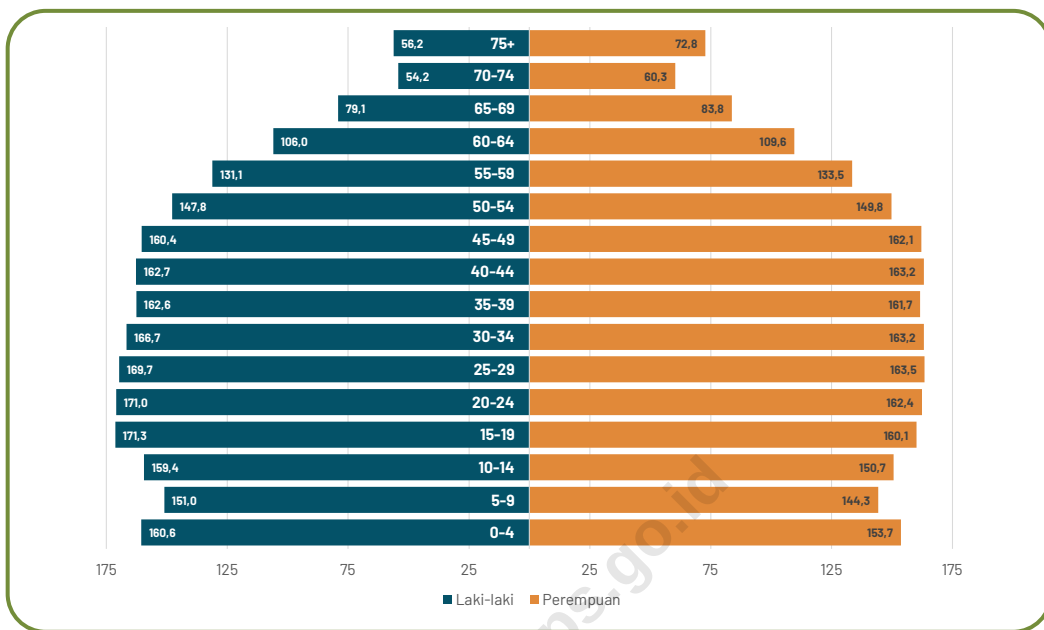
Gambar 1.2 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, rasio jenis kelamin penduduk Bali pada usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 101,32, yang menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk laki-laki pada usia produktif. Sedangkan, pada usia tidak produktif lagi atau umur 65 tahun ke atas, lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini juga sejalan dengan indikator umur harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan memiliki harapan untuk hidup lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan di usia tidak produktif lagi di antaranya adalah aktivitas laki-laki yang umumnya cenderung lebih berbahaya/berisiko dan memiliki tingkat kepedulian terhadap kesehatan yang cenderung lebih rendah, serta dari sisi genetika dan hormon yang secara teori menyatakan bahwa laki-laki cenderung lebih rentan terserang penyakit (Baum dkk., 2021).

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Provinsi Bali (ribu jiwa), 2023

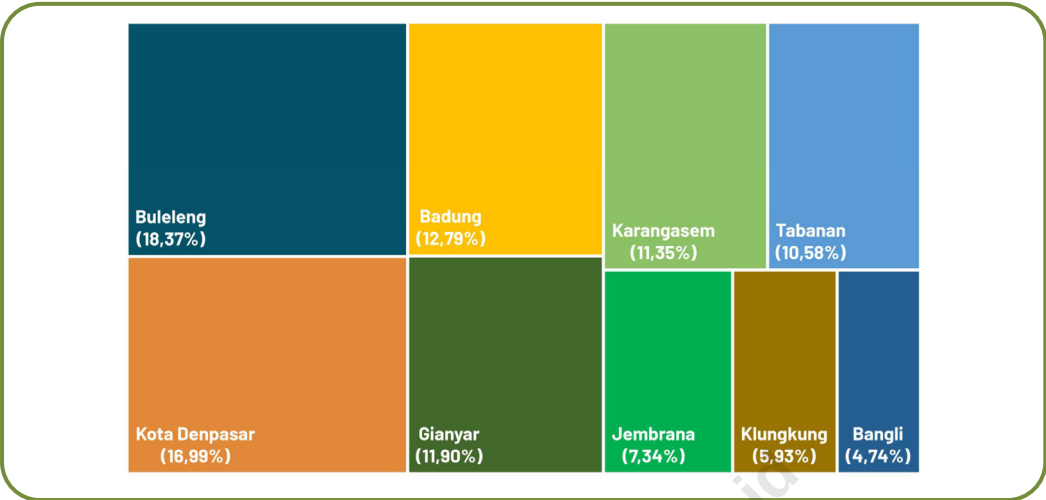


Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

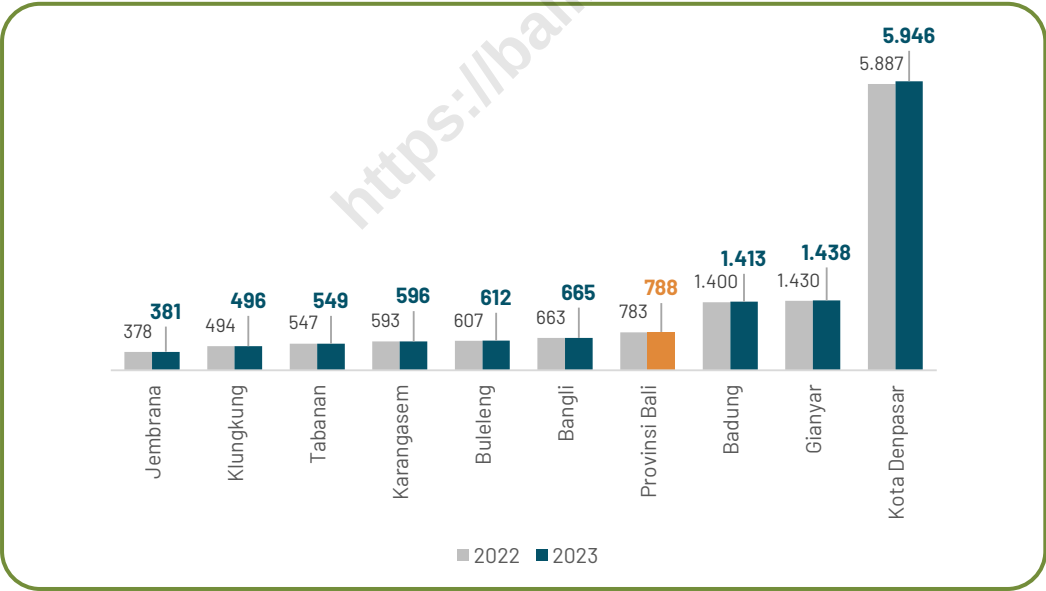
Persebaran penduduk merupakan indikator demografi yang memberikan gambaran bagaimana bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Berdasarkan *Grand Design Pembangunan Kependudukan* (Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014), penataan persebaran penduduk yang menjadi kebijakan pemerintah adalah untuk mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pada tahun 2023, penduduk Bali tercatat paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng, yakni sebesar 18,37 persen. Berikutnya, persebaran penduduk terbesar kedua dan ketiga terdapat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dengan masing-masing sebesar 16,99 dan 12,79 persen. Terkonfirmasi dari Gambar 1.4, Kabupaten Bangli merupakan daerah dengan persebaran penduduk paling sedikit di Bali, yaitu kurang dari lima persen. Terkonsentrasinya penduduk di Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Bali dengan luas wilayah sebesar 23,61 persen dari total luas Pulau Bali, serta merupakan salah satu kota pendidikan di Bali. Sementara itu, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung karena merupakan pusat aktivitas ekonomi Bali, sehingga memiliki daya tarik bagi penduduk untuk melakukan perpindahan dan tinggal di wilayah ini.

Gambar 1.4 Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Gambar 1.5 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (jiwa per km²), 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Kepadatan penduduk merupakan ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Bali pada tahun 2023 sebesar 788 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan penduduk terpadat di Bali adalah Kota Denpasar.



Dengan luas wilayah hanya 127,78 kilometer persegi, Kota Denpasar menampung hampir satu juta jiwa. Sehingga, kepadatan penduduk Kota sebesar 5.948 jiwa per kilometer persegi wilayahnya. Fakta ini sangat dipengaruhi oleh peran dari Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi Bali. Kabupaten Gianyar merupakan daerah dengan penduduk terpadat kedua di Bali, yaitu 1.438 jiwa per kilometer persegi, diikuti Kabupaten Badung dengan 1.413 jiwa per kilometer persegi. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah di Bali adalah Kabupaten Jembrana. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.5, pada kabupaten ini terdapat sekitar 381 jiwa per kilometer persegi. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung memunculkan permasalahan lingkungan. Pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungan terhadap penambahan populasi penduduk yang mengindikasikan kelebihan penduduk (*over population*). Permasalahan yang muncul pada daerah padat penduduk sangatlah kompleks, sehingga peran pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko yang muncul sangat diharapkan.

Beban Ketergantungan Penduduk

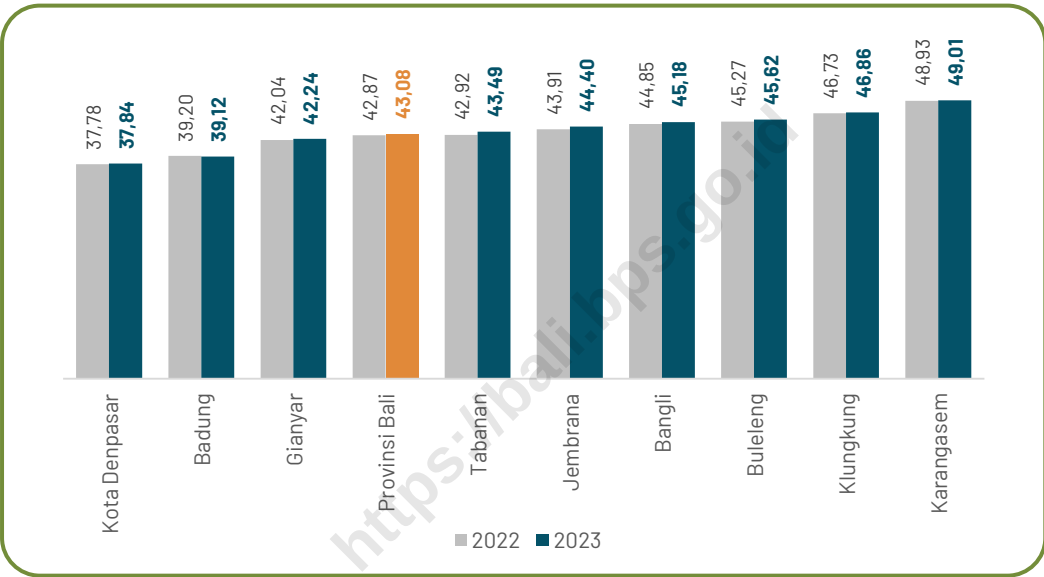
Rasio beban ketergantungan atau *dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang memberikan gambaran komposisi penduduk berdasarkan usia. Semakin tingginya rasio ketergantungan, dapat diartikan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (kurang dari 15 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Pada tahun 2023, rasio beban ketergantungan Bali sebesar 43,08 persen, atau dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Bali menanggung sekitar 43 penduduk usia nonproduktif. Berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa Bali masih berada pada periode jendela peluang (*window of opportunity*) untuk menikmati Bonus Demografi, yang diproyeksikan berakhir pada tahun 2033, di mana rasio beban ketergantungan bernilai lebih dari 50 setelah tahun 2033 (BPS Provinsi Bali, 2023). Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Karangasem memiliki rasio beban ketergantungan tertinggi dan diproyeksikan akan meningkat serta bernilai lebih dari 50 setelah tahun 2027. Sedangkan, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki rasio beban ketergantungan terendah, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.6.

Kondisi beban ketergantungan yang rendah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya agar penduduk usia produktif yang dimiliki dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk Bali, sehingga dapat

dikatakan sebagai Bonus Demografi. Pasca Pandemi Covid-19, perekonomian Bali telah kembali bangkit dan pada lima triwulan terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran Bali persisten mengalami penurunan. Berkaca pada kondisi Bali yang semakin membaik, kualitas penduduk usia produktif harus terus ditingkatkan sehingga mereka memiliki produktivitas yang tinggi dan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Gambar 1.6 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022-2023



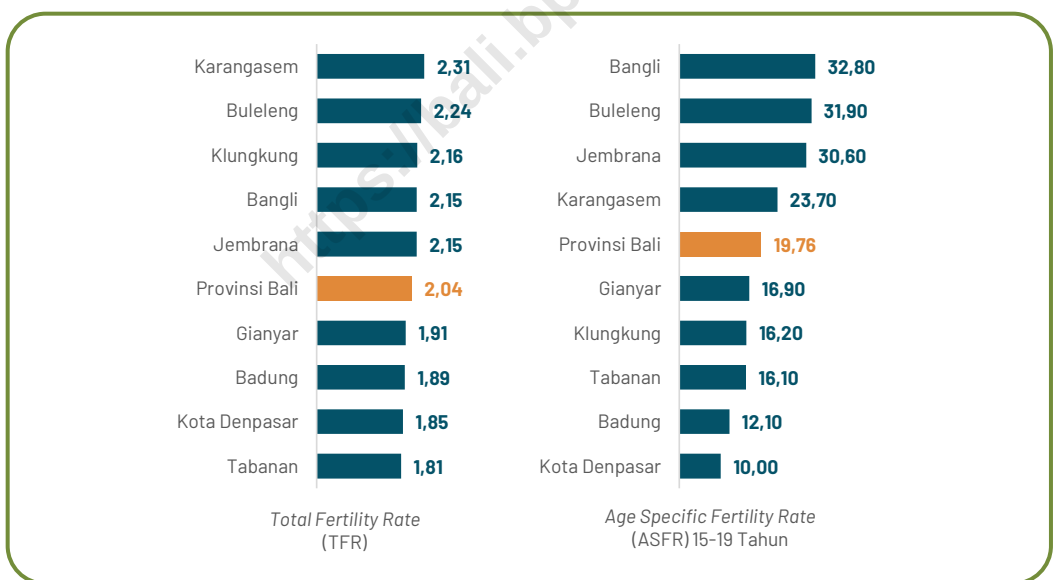
Sumber: BPS Provinsi Bali, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020

Fenomena kependudukan lain yang terjadi di Bali adalah penduduk Bali sudah berada pada kondisi penuaan penduduk (*aging population*). Suatu wilayah dikatakan mengalami penuaan penduduk ketika persentase penduduk lansia di suatu wilayah mencapai 10 persen lebih (Adioetomo & Mujahid, 2014). Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia lansia atau yang berumur 60 tahun ke atas di Bali sudah lebih dari 10 persen, yaitu sebesar 14,12 persen. Kondisi penduduk lansia yang semakin tinggi ini menunjukkan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat dalam hal kesehatan. Harapannya, mereka menjadi lansia yang produktif dan mandiri, serta memberikan manfaat kepada Bonus Demografi kedua, di mana dengan semakin meningkatnya proporsi penduduk lansia dapat memberikan sumbangan kepada perekonomian (Heryanah, 2015). Untuk itu, kebijakan pembangunan kependudukan di Bali juga perlu mempertimbangkan penduduk lansia yang semakin meningkat.

Fertilitas

Istilah fertilitas sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu lahirnya bayi dari rahim wanita dengan memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan tersebut meliputi bergerak, menangis, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Kondisi bayi yang lahir tanpa tanda-tanda kehidupan tidak dapat dianggap sebagai peristiwa kelahiran (Mantra, 2011). Salah satu indikator demografi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi fertilitas adalah *Total Fertility Rate* (TFR). TFR dapat diinterpretasikan sebagai rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (umur 15–49 tahun). Berdasarkan hasil *Long Form* SP2020, TFR Bali berada pada 2,04, atau berarti rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh perempuan Bali pada masa reproduksinya sejumlah dua anak. TFR tertinggi berada pada Kabupaten Karangasem, sedangkan yang terendah berada pada Kabupaten Tabanan (Gambar 1.7).

Gambar 1.7 *Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022*



Sumber: BPS Provinsi Bali, *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Kondisi TFR Bali telah berada di bawah *replacement level*, yang ditandai oleh TFR berada di bawah 2,1, dengan asumsi tingkat migrasi masuk dan keluar bernilai sama dan tingkat kematian tidak berubah (OECD, 2016). *Replacement level* menandakan kondisi tingkat kelahiran di mana suatu populasi secara tepat dapat digantikan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga penduduk dapat tumbuh seimbang. Kondisi TFR Bali yang berada di bawah



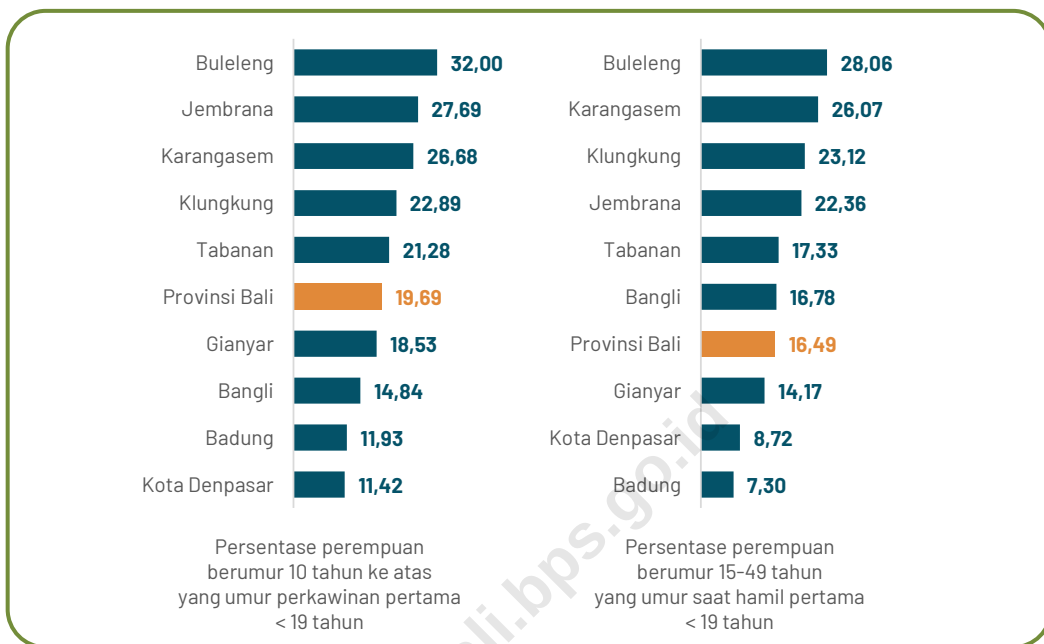
replacement level dapat mengancam keberlanjutan penduduk Bali. Selain itu, Bali memiliki kearifan lokal terkait kelahiran yang identik dengan pola penamaan untuk empat orang anak, yaitu Putu/Wayan, Made/Kadek, Nyoman/Komang, dan Ketut. Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali, yang di dalamnya mengarahkan *Krama* Bali untuk mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi sesuai kearifan lokal Bali. Untuk itu, kebijakan kelahiran di Bali perlu untuk diperhatikan mengingat tingkat kelahiran yang semakin menurun. Terlebih kepada Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar yang TFR-nya juga bernilai kurang dari 2,1.

Indikator lainnya yang lebih spesifik melihat tingkat kelahiran pada masing-masing kelompok umur adalah *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). Terlebih pada ASFR kelompok umur 15-19 tahun, yang dapat menjadi gambaran kelahiran pada usia dini. ASFR 15-19 tahun juga merupakan salah satu target dari SDGs Tujuan ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, dalam rangka menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. ASFR 15-19 tahun Bali berada pada nilai 19,76 yang berarti rata-rata terdapat 19 sampai 20 kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama. ASFR 15-19 tahun tertinggi berada di Kabupaten Bangli, diikuti Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Penurunan ASFR 15-19 perlu terus dilakukan mengingat kelahiran pada kelompok umur ini adalah kelahiran yang berisiko, baik kepada ibu yang melahirkan maupun bayi yang akan dilahirkan. Namun, pengendalian pada indikator ini juga tidak lepas dari gambaran perkawinan usia dini yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Usia Perkawinan dan Kelahiran Pertama

Perkawinan yang terjadi pada usia dini akan menimbulkan berbagai risiko khususnya kepada perempuan. Perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia muda memiliki periode reproduksi yang lebih panjang dan berpotensi memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi. Selain itu, perkawinan pada usia dini berpotensi menyebabkan kehamilan dan kelahiran pada usia dini juga, yang tentu berisiko kepada sang ibu, baik dari sisi kesehatan, maupun aspek lainnya seperti kesiapan mental, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia telah melakukan penyesuaian aturan hukum terkait dengan perkawinan yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana saat ini batas usia minimal untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun.

Gambar 1.8 Persentase Perempuan yang Umur Perkawinan Pertama dan yang Umur Saat Hamil Pertama Kurang dari 19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022, masih terdapat 19,69 persen penduduk perempuan yang memiliki umur perkawinan pertama di bawah 19 tahun. Selain itu, terdapat 16,49 persen penduduk perempuan yang umur saat hamil pertama di bawah 19 tahun. Empat kabupaten dengan proporsi perempuan yang umur perkawinan dan kelahiran pertama di bawah 19 tahun tertinggi adalah Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung (Gambar 1.8). Dengan adanya penyesuaian batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun, serta dibarengi dengan pendidikan terkait kesehatan reproduksi khususnya kepada penduduk berumur 15-19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, harapannya dapat mendorong penurunan tingkat ASFR 15-19 tahun di Bali.

Penggunaan Alat/Cara Kontrasepsi

Penggunaan alat/cara kontrasepsi erat kaitannya dengan kebijakan pengendalian penduduk yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, penggunaan alat/cara kontrasepsi juga bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak akibat kelahiran yang tidak direncanakan. Berdasarkan Tabel 1.2, terdapat 48,26 persen perempuan pernah kawin di

Bali pada tahun 2022 yang menggunakan alat/cara kontrasepsi. Persentase tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 51,36 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis alat/cara kontrasepsi yang digunakan, dari perempuan pernah kawin yang menggunakan alat/cara kontrasepsi, mayoritas menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yang terdiri dari IUD/AKDR/spiral, suntikan KB, dan susuk KB/implan, dan persentasenya sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Khususnya pada alat kontrasepsi suntikan KB, yang memiliki persentase besar. Di sisi lain, meskipun persentasenya masih paling rendah, kontrasepsi permanen pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, MKJP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup, sedangkan non MKJP pemakaiannya berkisar 1 sampai 3 bulan saja.

Tabel 1.2 Persentase Perempuan yang Sedang Menggunakan Alat/ Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Provinsi Bali, 2020-2022

Alat/Cara Kontrasepsi	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sedang menggunakan alat/ cara kontrasepsi	54,72	51,36	48,26
- Tradisional	13,23	3,00	3,28
- Non-MKJP	13,46	15,29	13,57
- MKJP	63,92	72,40	71,99
- Permanen	9,38	9,32	11,17

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Kesehatan dan Gizi

Salah satu faktor yang menentukan kualitas pembangunan manusia adalah kesehatan dan gizi dari penduduknya. Kesehatan merupakan hak dasar manusia, karena dengan kondisi yang sehat, memungkinkan setiap orang untuk produktif baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi pemerintah, kesehatan penduduk merupakan modal penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Upaya Pemerintah Provinsi Bali melalui program pembangunan di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan meliputi penerapan Jaminan Kesehatan Nasional - *Krama* Bali Sejahtera (JKN-KBS) untuk memastikan jaminan kesehatan yang inklusif bagi penduduk Bali, peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas sarana dan infrastruktur kesehatan, serta penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan merata ke seluruh daerah di Bali.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk antara lain angka harapan hidup, angka kematian, dan angka kesakitan. Semakin tinggi angka harapan hidup, menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan, angka kematian dan angka kesakitan akan menurun.

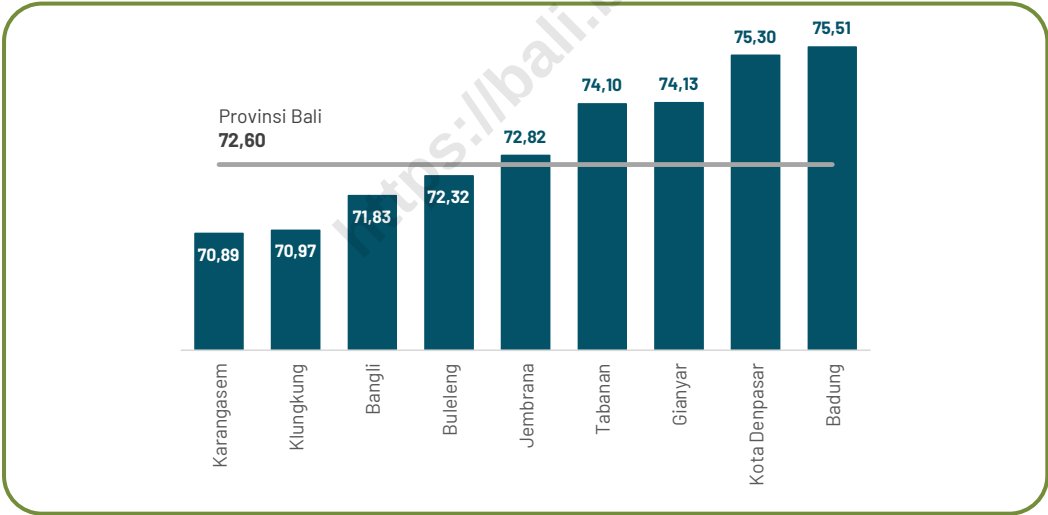
Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengukur rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Pentingnya UHH terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan UHH, seperti gizi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Provinsi Bali dan Indonesia (tahun), 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2010-2022

Gambar 2.2 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022



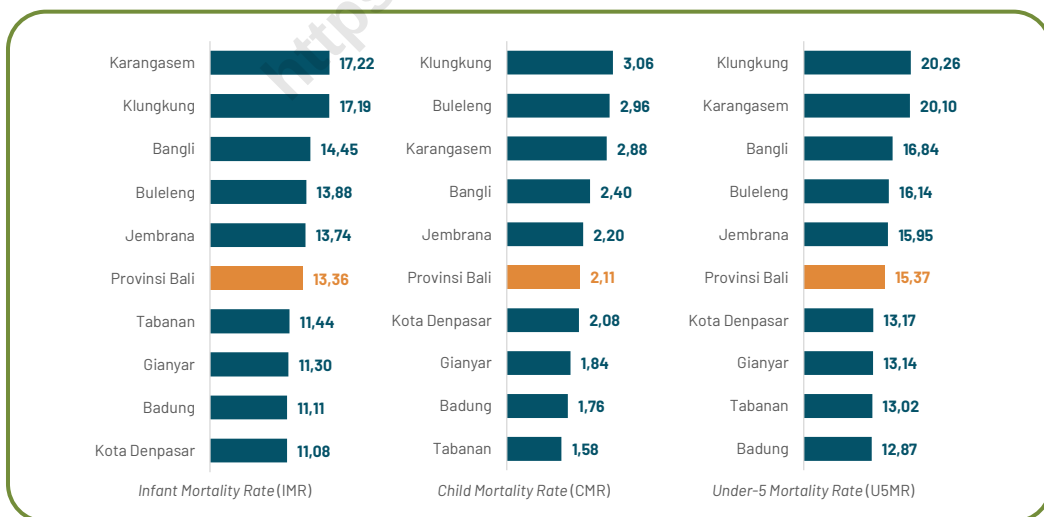
Sumber: BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali 2022

Gambar 2.1 dan 2.2 menampilkan tren UHH penduduk Bali dibandingkan dengan nasional dan menurut kabupaten/kota. UHH penduduk Bali pada tahun 2022 mencapai 72,60 tahun dibandingkan dengan UHH Indonesia 71,85 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 di Bali secara rata-rata dapat diharapkan mencapai umur sekitar 71 hingga 72 tahun. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan UHH Bali di tahun 2022 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 0,50 persen dibandingkan

tahun 2021. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 0,39 persen. Peningkatan UHH Bali ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan UHH tertinggi yang mencapai 75,51 tahun. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan UHH masing-masing sebesar 75,30 tahun dan 74,13 tahun. Sedangkan Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Buleleng memiliki UHH yang lebih rendah dari UHH Bali.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian. Hingga saat ini, angka kematian masih digunakan sebagai indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dimana capaiannya menunjukkan tren penurunan. Beberapa indikator angka kematian di antaranya adalah Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR), Angka Kematian Anak atau *Child Mortality Rate* (CMR), dan Angka Kematian Balita atau *Under-5 Mortality Rate* (U5MR). IMR melihat penduduk berumur di bawah 1 tahun, CMR melihat penduduk 1-4 tahun, sedangkan U5MR melihat penduduk di bawah umur 5 tahun, atau dengan kata lain 0-4 tahun. Ketiga angka kematian tersebut dilihat berdasarkan jumlah kematiannya per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.3 *Infant Mortality Rate (IMR), Child Mortality Rate (CMR), dan Under-5 Mortality Rate (U5MR) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022*



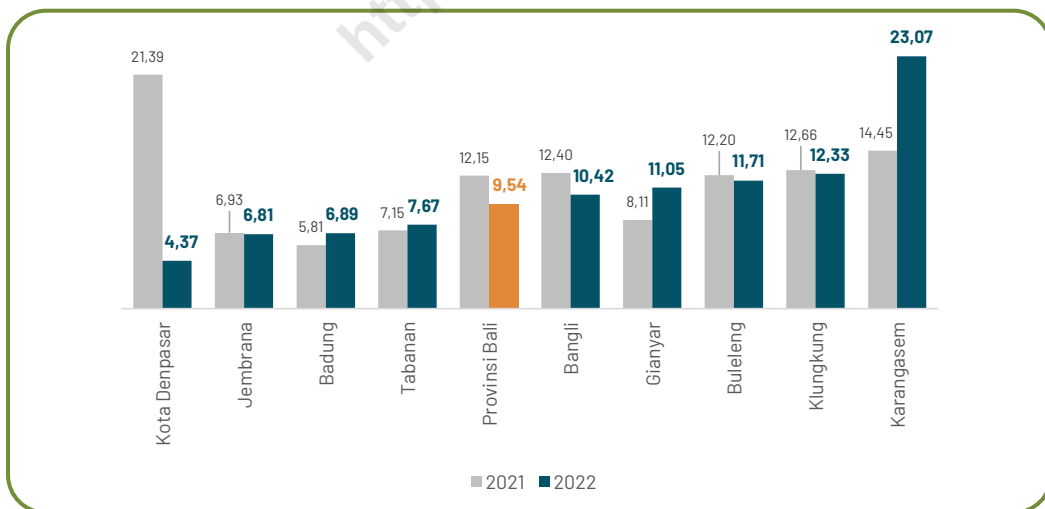
Sumber: BPS Provinsi Bali, *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sebagaimana Gambar 2.3, kondisi IMR, CMR, dan U5MR Bali berdasarkan hasil *Long Form* SP2020 masing-masing sebesar 13,36, 2,11, dan 15,37 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan satu sama lain, hal ini

berarti kematian penduduk usia kurang dari 1 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia 1-4 tahun. Hal ini dapat dijelaskan mengingat bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Jika dibandingkan menurut kabupaten/kota, wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang merupakan wilayah metropolitan di Bali memiliki angka kematian yang lebih rendah dari kondisi rata-rata di Bali. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, IMR Bali berhasil diturunkan hampir setengahnya selama satu dekade dari sebelumnya sebesar 24 kematian di tahun 2010. Angka ini tentunya diharapkan terus menurun sesuai tujuan SDGs ketiga, yakni mengurangi IMR setidaknya menjadi kurang dari 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup sampai tahun 2030.

Indikator lain terkait derajat kesehatan adalah angka kesakitan yang menggambarkan kondisi penduduk yang memiliki keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan merupakan gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang banyak dialami antara lain panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi, dan keluhan kesehatan lainnya.

Gambar 2.4 Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen), 2021-2022



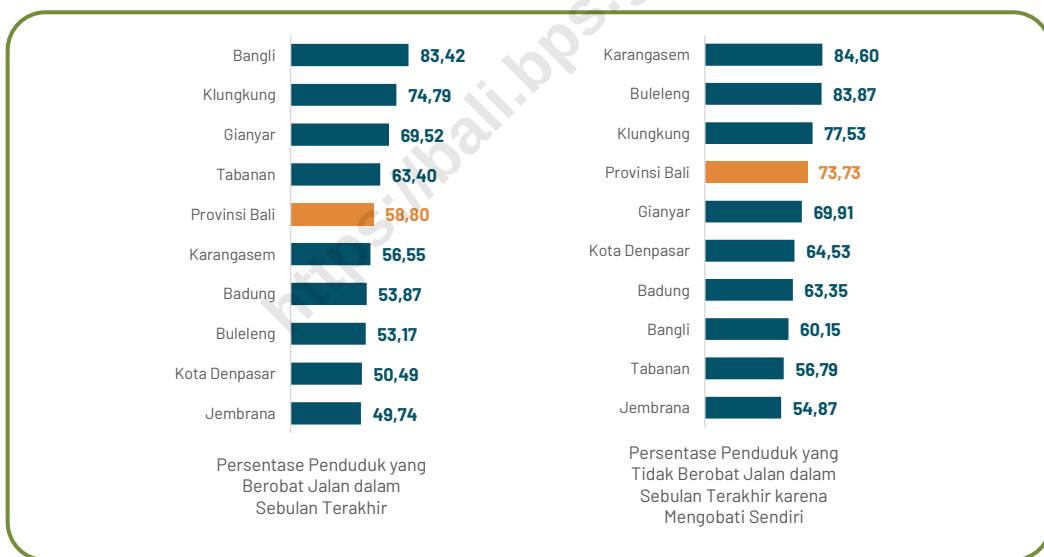
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

Pada tahun 2022, angka kesakitan Bali tercatat sebesar 9,54 persen, menurun sebesar 2,61 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi

ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 9 sampai 10 orang penduduk Bali yang mengalami keluhan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kesadaran terhadap kesehatan di tengah pandemi memang meningkat sehingga keluhan kesehatan menurun.

Dilihat lebih detail menurut kabupaten/kota, Kabupaten Karangasem memiliki angka kesakitan tertinggi yaitu sebesar 23,07 persen, dengan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Di sisi lain, Kota Denpasar memiliki angka kesakitan terendah dan dengan penurunan terbesar. Terdapat empat kabupaten lain selain Kota Denpasar yang juga mengalami penurunan angka kesakitan di tahun 2022, yaitu Kabupaten Klungkung, Buleleng, Bangli, dan Jembrana (Gambar 2.4).

Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan atau yang Tidak Berobat Jalan karena Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022



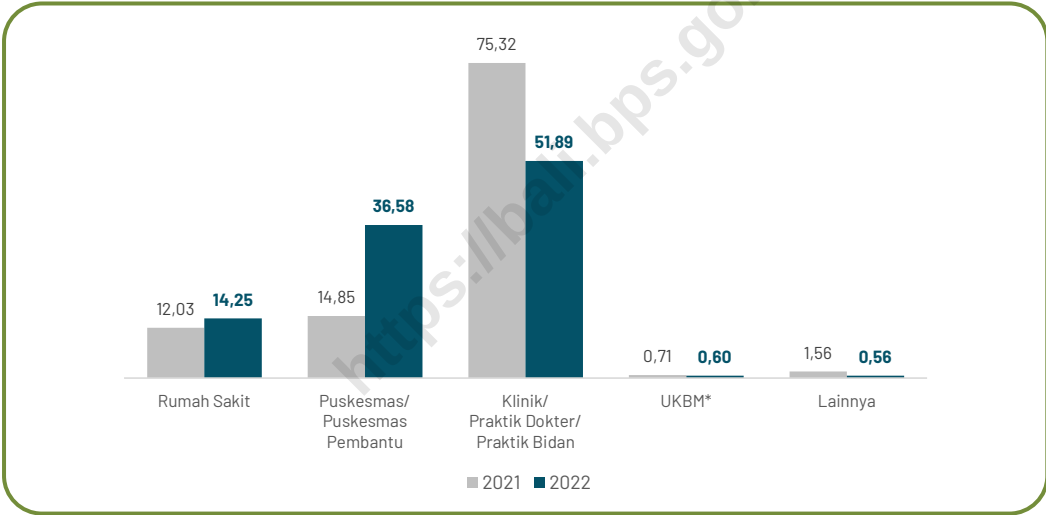
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk, perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan agar mendapatkan penanganan medis dengan baik. Pada tahun 2022, sekitar 58,80 persen penduduk atau lebih dari setengah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan melakukan upaya berobat jalan (Gambar 2.5). Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 53,31 persen. Kabupaten Bangli merupakan wilayah yang persentase penduduknya berobat jalannya tertinggi ketika memiliki keluhan kesehatan, yaitu sebesar 83,42 persen.

Di sisi lain, masih terdapat 41,20 persen penduduk Bali yang memiliki keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan. 73,73 persen dari mereka yang tidak berobat jalan karena alasan mengobati sendiri. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Karangasem memiliki persentase terbesar terkait perilaku mengobati sendiri. Jika dilihat kembali bahwa angka kesakitan di Kabupaten Karangasem merupakan yang tertinggi (Gambar 2.4), fakta ini perlu menjadi perhatian bersama. Mengingat perilaku mengobati sendiri berpotensi menimbulkan dampak negatif karena pengobatan yang tidak tepat dan tanpa petunjuk dari tenaga kesehatan.

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Gambar 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Provinsi Bali, 2021-2022



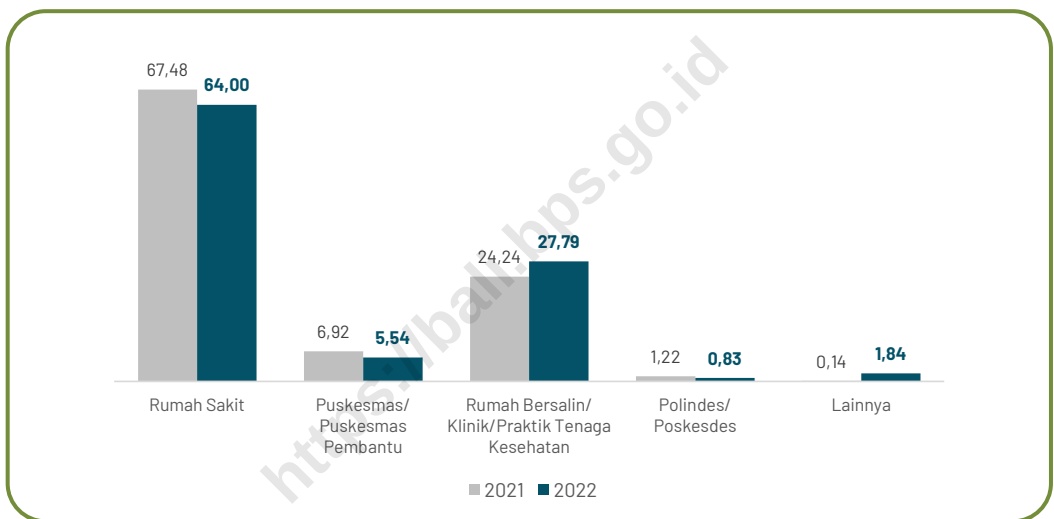
Catatan: *Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, dan Balai Pengobatan.

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret 2021-2022

Akses pada layanan dasar kesehatan menjadi salah satu isu strategis. Fasilitas kesehatan yang merata merupakan salah satu faktor penting untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan. Pada tahun 2022, hanya terdapat 0,56 persen penduduk yang berobat jalan tidak pada fasilitas kesehatan (pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya). Lebih dari setengah penduduk atau sebesar 51,89 persen yang berobat jalan di klinik, praktik dokter bersama, praktik dokter, atau praktik bidan mandiri. Namun, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 75,32 persen. Di sisi lain, persentase penduduk

yang memilih berobat jalan di rumah sakit dan puskesmas/puskesmas pembantu mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, sebagaimana Gambar 2.6. Kedua fasilitas kesehatan tersebut masing-masing meningkat sebesar 2,22 persen poin dan 21,73 persen poin, sehingga menjadi sebesar 14,25 persen dan 36,58 persen pada tahun 2022. Berkurangnya kekhawatiran akan terpaparnya virus Covid-19 sehingga menghindari tempat-tempat keramaian membuat penduduk kembali memilih rumah sakit dan puskesmas/puskesmas pembantu sebagai tempat berobat jalan.

Gambar 2.7 Persentase Perempuan Berumur 15–49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Provinsi Bali, 2021–2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2022

Fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu faktor utama dalam menurunkan tingkat kematian ibu dan anak pada proses persalinan. Persalinan yang dilakukan pada fasilitas kesehatan akan lebih aman karena menerapkan proses persalinan yang sesuai dengan standar kesehatan dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Berdasarkan Gambar 2.7, sebesar 98,16 persen penduduk perempuan berumur 15–49 tahun yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2022, yang berarti hanya 1,84 persen yang melakukan persalinan tidak di fasilitas kesehatan (di rumah atau lainnya). Sedangkan penduduk yang memilih bersalin di rumah sakit atau puskesmas/puskesmas pembantu mengalami penurunan. Persentase penduduk yang memilih bersalin di rumah bersalin/klinik/praktik tenaga kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Dari 24,24 persen pada tahun 2021 menjadi 27,79 persen pada tahun 2022 atau

meningkat sebesar 3,55 persen poin. Seiring dengan semakin baiknya layanan kesehatan maternal di rumah bersalin/klinik/praktik tenaga kesehatan, jam operasional yang lebih fleksibel, serta faktor kenyamanan dan privasi yang relatif lebih baik diperkirakan menjadi faktor pendorong banyaknya pilihan jatuh pada fasilitas kesehatan ini.

Gizi dan Imunisasi Anak

Imunitas manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi imunitas sejak dini. Air susu ibu (ASI) menjadi makanan pertama yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Pemberian ASI pada anak direkomendasikan hingga anak berumur 2 tahun. Bahkan ASI direkomendasikan untuk diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama, karena kebutuhan gizi anak sudah cukup melalui ASI dan belum memerlukan tambahan makanan lain.

Tabel 2.1 Baduta/Balita yang Mendapatkan ASI dan Imunisasi di Provinsi Bali, 2021-2022

Indikator	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Persentase anak umur < 2 tahun yang pernah diberi ASI (persen)	94,99	89,41
Rata-rata lama pemberian ASI (bulan)	10,44	10,38
Persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap* (persen)	73,18	72,93
Persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi (persen):		
- BCG	96,23	96,83
- DPT	93,22	95,20
- Polio	96,86	93,98
- Campak	78,37	81,69
- Hepatitis B	96,08	97,76

Catatan: *Imunisasi lengkap adalah pemberian imunisasi BCG sebanyak 1 kali, Polio sebanyak 3 kali, DPT sebanyak 3 kali, Campak sebanyak 1 kali, dan Hepatitis B sebanyak 3 kali.

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

Meskipun pemberian ASI direkomendasikan hingga anak berumur 2 tahun, persentase anak yang berumur kurang dari 2 tahun yang pernah diberi ASI selama 6-23 bulan baru mencapai 89,41 persen (Tabel 2.1). Artinya, masih terdapat 10,59 persen anak berumur kurang dari 2 tahun yang tidak pernah diberi ASI pada tahun 2022, dan persentasenya meningkat dibandingkan



dengan tahun 2021 yang hanya 5,01 persen. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata lama pemberian ASI yang juga menurun tipis dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 10,44 bulan menjadi 10,38 bulan. Secara rata-rata, anak berumur kurang dari 2 tahun diberi ASI selama 10 sampai 11 bulan.

Selain ASI, pemberian imunisasi juga berperan penting untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, sehingga melindungi tubuh dari penyakit tertentu di masa depan. Pemerintah mencanangkan program imunisasi dasar lengkap untuk setiap anak yang berumur 0-11 bulan yang terdiri dari: 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis imunisasi DPT, 3 dosis imunisasi polio, 1 dosis campak, dan 3 dosis imunisasi Hepatitis B.

Pada tahun 2022, terdapat 72,93 persen balita yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 73,18 persen. Menurut jenis imunisasi, capaian paling rendah terdapat pada imunisasi campak yaitu sebesar 81,69 persen. Selain itu, cakupan imunisasi pada balita yang kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya adalah imunisasi polio. Meskipun cakupan imunisasi pada masing-masing jenis imunisasi telah tinggi, namun belum seluruhnya menerima imunisasi secara lengkap. Kesadaran para orang tua akan pentingnya pemberian imunisasi kepada anak masih perlu untuk ditingkatkan.

<https://ibm.uns.ac.id>

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Pemerintah Provinsi Bali dalam RKP 2024-2026. Tujuan dari peningkatan kualitas manusia adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas sistem pendidikan memiliki peran sentral. Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, dengan menggunakan dana abadi pendidikan yang sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4).

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada situasi pandemi, sistem pendidikan dipaksa untuk memanfaatkan teknologi digital dalam implementasinya, seperti pembelajaran jarak jauh secara daring. Seiring dengan berakhirnya pandemi dan pemulihan pasca pandemi, pemerintah melakukan berbagai transformasi sistem pendidikan dalam upaya memastikan seluruh rakyat Indonesia mampu mendapatkan pendidikan yang layak.

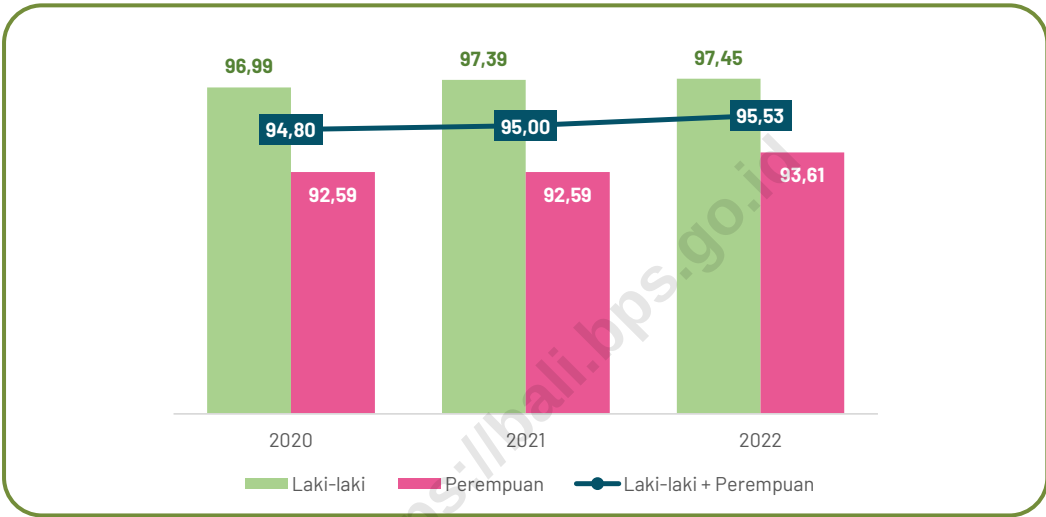
Pembangunan pendidikan juga perlu dipantau untuk melihat sejauh mana peningkatan kualitasnya. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan antara lain angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM), tingkat pendidikan tertinggi, serta indikator input pendidikan seperti ketersediaan infrastruktur dan tenaga pendidik.

Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Menurut UNESCO (2013), melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak

dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf sekaligus menunjukkan perkembangan intelektual suatu wilayah.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2020-2022

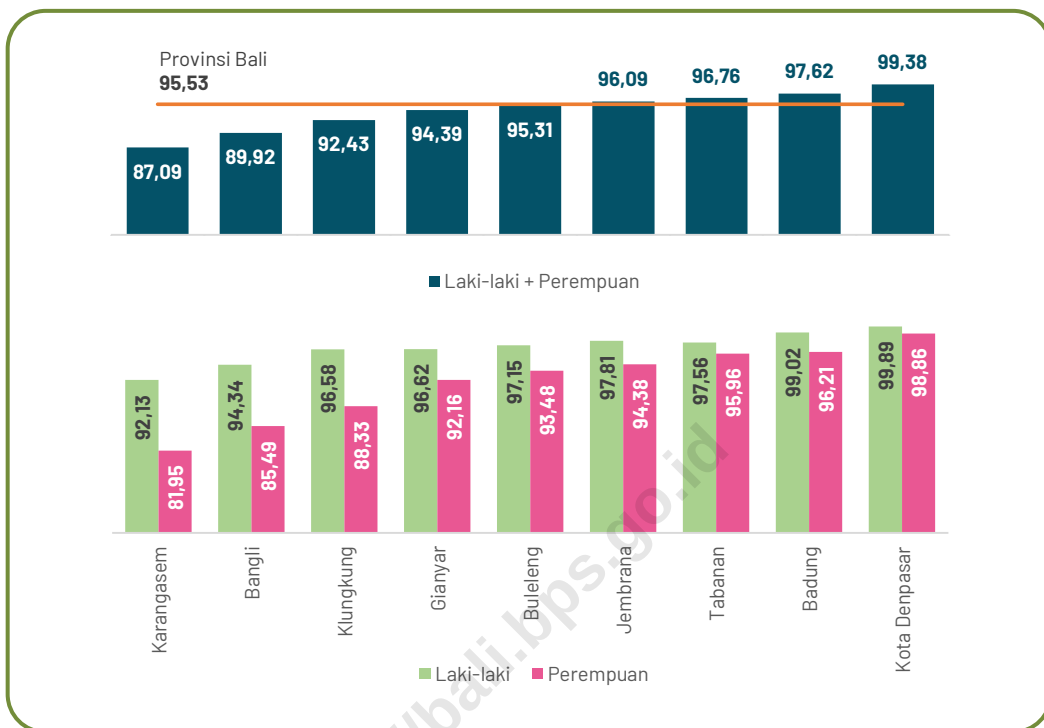


Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Selama periode 2020-2022, AMH Bali persisten mengalami peningkatan (Gambar 3.1). Pada tahun 2022, AMH Bali sebesar 95,53 persen, yang berarti hanya 4,47 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang belum bisa membaca dan menulis serta mengerti kalimat sederhana. Capaian ini meningkat sebesar 0,53 persen poin dibandingkan tahun 2021, serta peningkatannya lebih tinggi dibandingkan peningkatan 2020 ke 2021 yang sebesar 0,20 persen poin. Menurut jenis kelamin, AMH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun, gap perbedaan antara keduanya semakin mengecil. Hal ini berarti, AMH perempuan mengalami peningkatan lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan dari laki-laki.

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Denpasar memiliki AMH tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 99,38 persen. Kota Denpasar juga memiliki gap perbedaan terendah antara AMH laki-laki dan perempuan, yang menunjukkan capaian pendidikan antargender semakin setara. Di sisi lain, Kabupaten Karangasem memiliki AMH terendah yang sebesar 87,09 persen. Hal ini berarti, masih terdapat 12,91 persen penduduk berumur 15

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2022



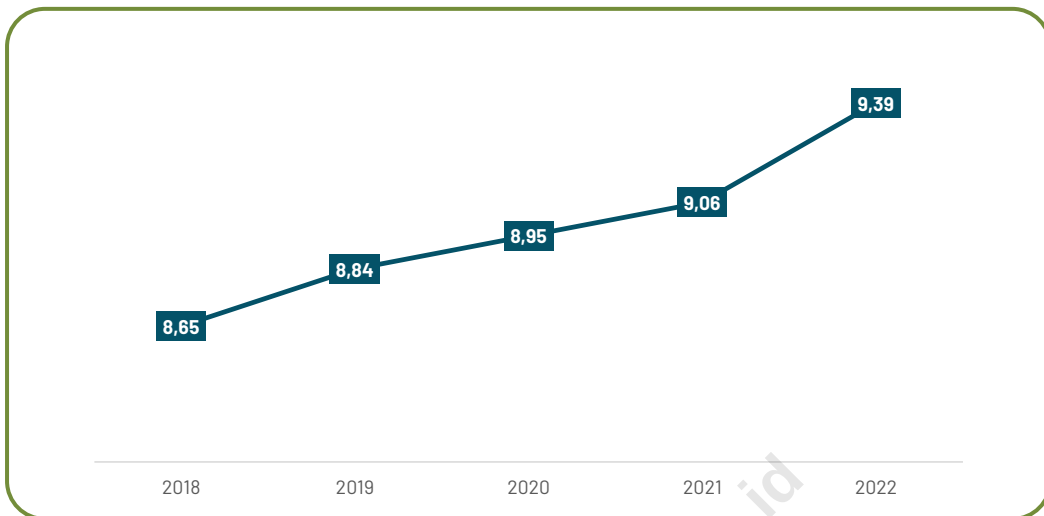
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

tahun ke atas yang belum melek huruf. Selain itu, gap perbedaan capaian AMH laki-laki dan perempuan pada kabupaten ini merupakan yang terbesar. Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dikatakan bahwa, semakin tinggi AMH di suatu kabupaten/kota maka semakin rendah gap perbedaan antara AMH laki-laki dan perempuan. Hal ini sekiranya memerlukan perhatian agar pendidikan di seluruh kabupaten semakin merata. Disamping itu, perlu juga dukungan dan kemudahan berbagai fasilitas pendidikan agar mampu mempercepat perkembangan bagi wilayah yang tertinggal.

Rata-Rata Lama Sekolah

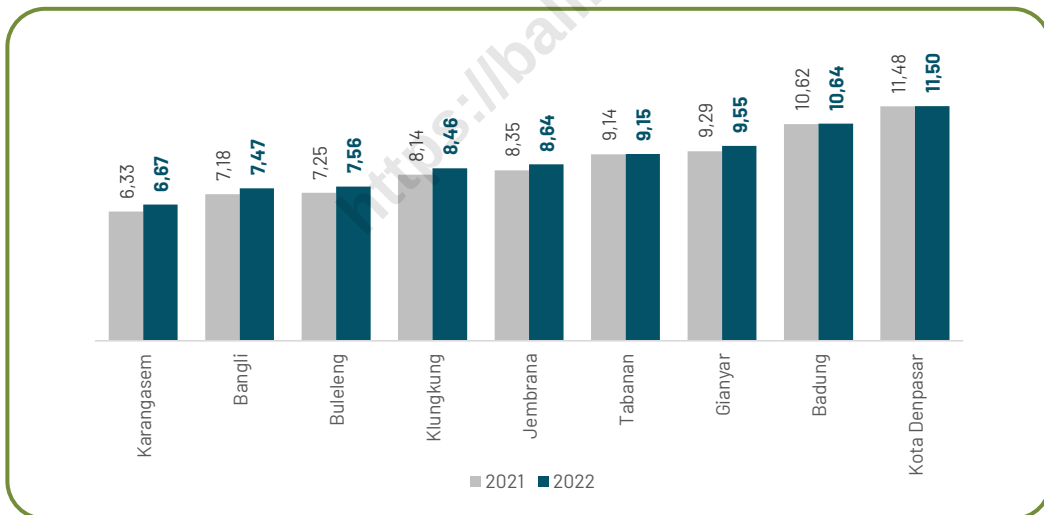
Rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan kondisi pendidikan penduduk berumur 25 tahun ke atas. Ditetapkan umur 25 tahun ke atas karena pada umur tersebut dianggap telah menyelesaikan pendidikan secara penuh. Indikator ini menggambarkan stok modal manusia yang telah melewati usia sekolah di suatu wilayah. Semakin tinggi RLS menunjukkan semakin banyak tahun yang digunakan oleh penduduk Bali dalam menjalani pendidikan formal.

Gambar 3.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali (tahun), 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018-2022

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (tahun), 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

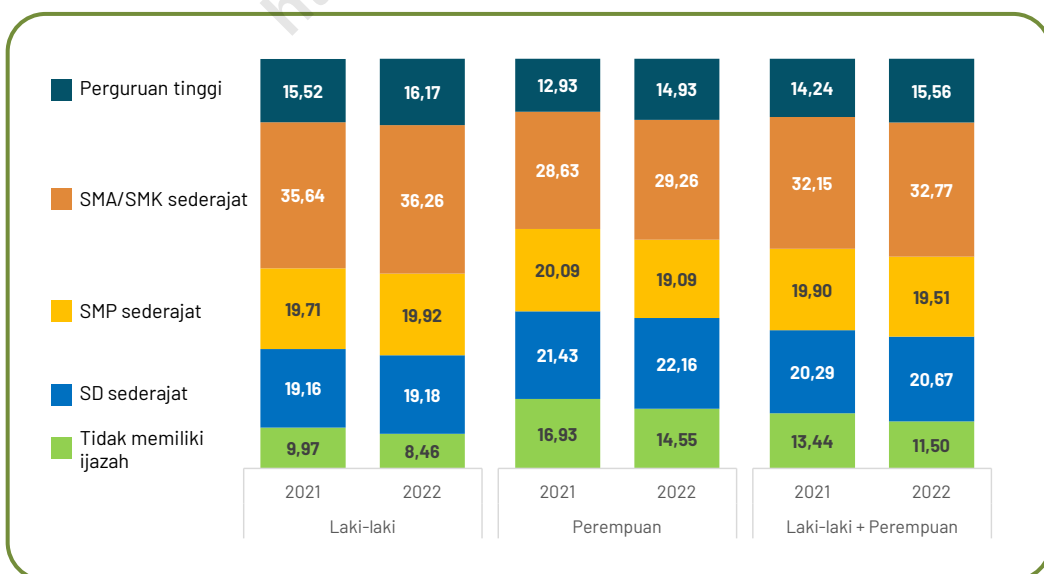
Secara umum, RLS Bali selama periode lima tahun (2018-2022) persisten mengalami peningkatan (Gambar 3.3). Pada tahun 2018, RLS Bali mencapai 8,65 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya besaran RLS mengalami peningkatan hingga mencapai 9,39 tahun pada tahun 2022 yang berarti penduduk yang berumur 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,39 tahun atau setara tamat SMP, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Kabupaten/kota yang berada pada wilayah Sarbagita memiliki RLS yang lebih tinggi. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung memiliki capaian RLS lebih dari 10 tahun, yang berarti rata-rata penduduk umur 25 tahun ke atas di wilayah ini sudah mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Pada sisi lainnya, Kabupaten Karangasem memiliki RLS terendah. RLS Kabupaten Karangasem tercatat hanya selama 6,67 tahun, yang berarti rata-rata penduduk umur 25 tahun ke atas di wilayah ini sampai tamat SD. Namun demikian, kecepatan peningkatan RLS di tahun 2022 pada kabupaten yang RLS-nya rendah cenderung lebih cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas stok modal manusia antar kabupaten/kota di Bali semakin merata.

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Indikator pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas, ditandai dengan ijazah yang dimiliki. Indikator ini menunjukkan kondisi capaian pendidikan dari penduduk usia produktif di suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi sebagai tenaga kerja. Peningkatan produktivitas seseorang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan berimplikasi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Gambar 3.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022



Berdasarkan Gambar 3.5, mayoritas penduduk berumur 15 tahun ke atas di Bali memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat dan mengalami peningkatan dari 2021 ke 2022 menjadi sebesar 32,15 persen, atau hampir sepertiga penduduk. Lebih lanjut, penduduk yang tidak memiliki ijazah berkurang dari 2021 ke 2022 menjadi 11,50 persen dan penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi bertambah menjadi 15,56 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian pendidikan yang semakin baik.

Tingkat pendidikan penduduk laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari penduduk yang tidak memiliki ijazah, persentase penduduk laki-laki hanya sebesar 8,46 persen di tahun 2022, sedangkan penduduk perempuan memiliki persentase lebih tinggi yaitu sebesar 14,55 persen. Di sisi lain, persentase penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi lebih besar pada penduduk laki-laki (16,17 persen) dibandingkan penduduk perempuan (14,93 persen). Namun demikian, baik penduduk laki-laki maupun perempuan memiliki capaian pendidikan lebih baik pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Seiring dengan berkurangnya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah, terjadi peningkatan persentase penduduk yang memiliki ijazah, baik yang pendidikan tertingginya di jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, maupun perguruan tinggi. Kecuali pada penduduk perempuan yang pendidikan tertingginya SMP sederajat, di mana persentasenya berkurang dari 20,09 persen pada tahun 2021 menjadi 19,09 persen pada tahun 2022.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Pada tahun 2022, APS Bali pada setiap kelompok umur sekolah mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021, kecuali kelompok umur 19-24 tahun (Tabel 3.1). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin di tahun 2022, penduduk perempuan mengalami peningkatan APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sedangkan kelompok umur 16-18 tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada penduduk laki-laki, baik kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun 16-18 tahun mengalami penurunan.

Perlu ada perhatian pada kelompok umur 16-18 tahun, di mana APS pada kelompok ini sebesar 83,84 persen, berbeda cukup jauh dengan APS kelompok

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7-12	99,67	99,35	99,73	99,76	99,70	99,55
13 - 15	98,15	97,21	98,30	98,53	98,22	97,85
16 - 18	83,55	83,36	84,39	84,36	83,96	83,84
19 - 24	-	-	-	-	28,95	30,18

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021-2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/ sederajat	97,38	97,53	97,01	97,39	97,20	97,46
SMP/ sederajat	87,21	87,42	86,99	86,30	87,11	86,88
SMA/ sederajat	74,01	74,91	75,69	74,55	74,82	74,73
Perguruan Tinggi	-	-	-	-	25,28	26,97

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

umur sebelumnya yang berada di atas 98 persen. Kondisi ini dapat diartikan bahwa terdapat sekitar satu dari lima penduduk yang tidak lagi bersekolah ketika memasuki kelompok umur 16-18 tahun.

Jika pada APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok umur sekolah, maka pada APM, telah memperhatikan jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok umur sekolah. Sehingga, APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya.

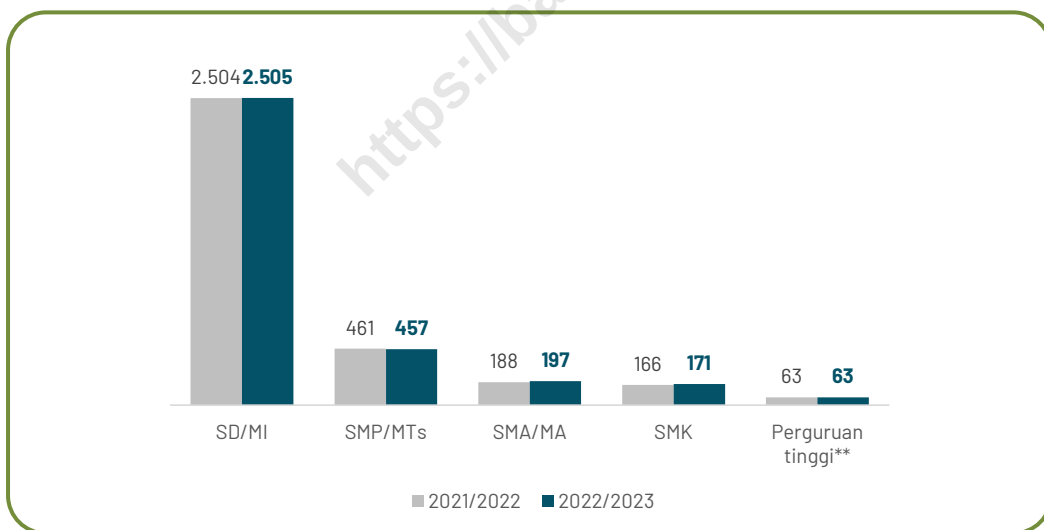
Sejalan dengan kondisi APS, APM Bali pada tahun 2022 mengalami penurunan pada jenjang SMP dan SMA, serta mengalami peningkatan pada jenjang Perguruan Tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Perbedaannya terdapat pada jenjang SD, di mana APM SD tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 97,46 persen, yang berarti proporsi penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang SD sederajat mengalami

peningkatan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM penduduk laki-laki pada jenjang SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan pada periode 2021-2022. Sedangkan pada penduduk perempuan, hanya APM jenjang SD yang mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa, gap perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya semakin melebar. Namun demikian, tingginya APM di Bali pada ketiga kelompok umur tersebut sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu indikator yang kiranya bisa mengukur kualitas pelayanan pendidikan adalah jumlah fasilitas sekolah yang telah dibangun. Semakin banyak fasilitas yang tersedia nampaknya dapat menggambarkan pelayanan pendidikan dari sisi infrastruktur yang semakin memadai. Dengan harapan jumlah sekolah yang memadai, tujuan pendidikan yang inklusif dan merata yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan kiranya bisa diraih.

Gambar 3.6 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jumlah Perguruan Tinggi* di Provinsi Bali, Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023



Catatan: *Jumlah guru termasuk kepala sekolah.

**Termasuk institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.

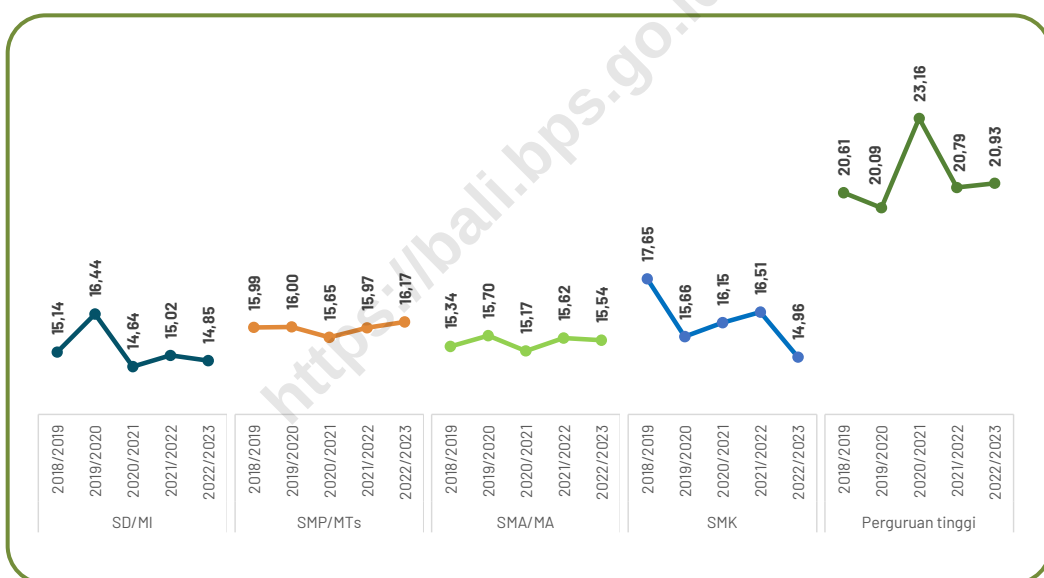
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Provinsi Bali Dalam Angka 2022-2023

Berdasarkan dua tahun ajaran terakhir, hanya jenjang pendidikan SMP sederajat yang mengalami penurunan jumlah sekolah sebanyak 4 fasilitas (Gambar 3.6). Peningkatan jumlah sekolah tertinggi tercatat pada jenjang

pendidikan SMA yang mencapai 9 fasilitas, sehingga terdapat 197 SMA di Bali pada tahun ajaran 2022/2023. Sedangkan jumlah sekolah pada jenjang SMK dan SD tercatat bertambah masing-masing sebanyak 5 fasilitas dan 1 fasilitas pada tahun ajaran 2022/2023 dibandingkan tahun ajaran 2021/2022. Sedangkan jumlah fasilitas perguruan tinggi masih tetap sama pada dua tahun ajaran terakhir.

Indikator lain yang bisa mengukur kualitas pelayanan pendidikan adalah rasio antara jumlah murid dengan guru dan jumlah mahasiswa dengan tenaga pendidik. Semakin kecil nilai rasio ini, kiranya dapat menandakan semakin memadainya pelayanan pendidikan dari sisi ketersediaan tenaga pendidik.

Gambar 3.7 Rasio Murid-Guru* Menurut Jenjang Pendidikan dan Rasio Mahasiswa-Tenaga Pendidik di Provinsi Bali, Tahun Ajaran 2018/2019 s.d. 2022/2023**



Catatan: *Jumlah guru termasuk kepala sekolah.

**Termasuk institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Provinsi Bali Dalam Angka 2019-2023

Rasio murid guru selama lima tahun ajaran terakhir pada jenjang SD dan SMK cenderung menurun (Gambar 3.7). Rasio murid-guru pada jenjang SD menurun dari 15,14 pada tahun ajaran 2018/2019 menjadi 14,85 pada tahun ajaran 2022/2023, atau berkurang sebesar 0,29 poin. Penurunan lebih tajam terjadi pada jenjang SMK, di mana rasio murid-guru pada tahun ajaran 2018/2019 sebesar 17,65 menjadi 14,96 pada tahun ajaran 2022/2023, atau berkurang sebesar 2,69 poin. Pada kedua jenjang ini, 1 orang guru kira-kira mengajar 14-15 orang murid.



Pada jenjang SMP dan SMA, rasio murid-guru cenderung stagnan selama lima tahun ajaran terakhir. Rasio murid-guru pada jenjang SMP hanya meningkat sebesar 0,18 poin, dari 15,99 pada tahun ajaran 2018/2019 menjadi 16,17 pada tahun ajaran 2022/2023. Pada jenjang SMA, rasio murid-guru hanya meningkat 0,20 poin sehingga menjadi 15,54 pada tahun ajaran 2022/2023. Pada jenjang SMP dan SMA kondisinya lebih baik dibandingkan jenjang SD dan SMK, di mana 1 orang guru mengajar 16-17 orang murid SMP atau 15-16 orang murid SMA.

Pada rasio mahasiswa-tenaga pendidik, nilainya cenderung mengalami peningkatan meskipun tipis. Dibandingkan dengan tahun akademik 2018/2019 yang sebesar 20,61, tahun akademik 2022/2023 mengalami peningkatan 0,32 poin menjadi sebesar 20,93. Kondisi ini dapat diartikan bahwa 1 orang tenaga pendidik di perguruan tinggi mengajar sekitar 20-21 orang mahasiswa. Rasio mahasiswa-tenaga pendidik sempat mengalami lonjakan pada tahun akademik 2020/2021.

Ketenagakerjaan

Semakin pulihnya perekonomian Bali pasca Pandemi Covid-19 salah satunya tergambarkan dalam kinerja positif pada indikator ketenagakerjaan. Kinerja pariwisata Bali yang telah kembali menggeliat tentu akan memberikan kembali daya tarik perekonomian yang menyerap tenaga kerja. Namun demikian, mengingat manusia bergerak dinamis, data ketenagakerjaan yang mutakhir sangat diperlukan dalam mengukur kinerja pembangunan dari sisi ketenagakerjaan.

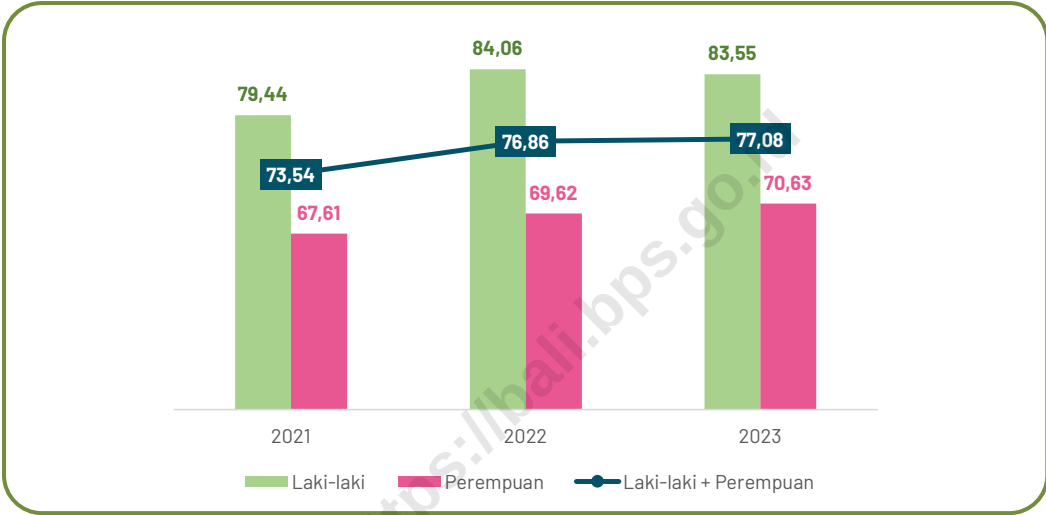
Dalam kaitannya mengukur kinerja ketenagakerjaan, pemerintah memakai standar internasional yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO), yaitu mengacu pada penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pengelompokan penduduk tersebut dikarenakan penduduk usia 15 tahun ke atas dianggap telah siap terlibat dalam ekonomi. Namun demikian, tidak semua penduduk usia kerja berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi sehingga penduduk usia kerja dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang aktif dalam aktivitas ekonomi meliputi: bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan, bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya.

Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Berdasarkan Gambar 4.1, TPAK Bali selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan menjadi sebesar 77,08 persen di tahun 2023. Partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, tetapi gap perbedaannya semakin mengecil dibandingkan dengan 2022, yang lebih disebabkan karena penurunan partisipasi angkatan

kerja laki-laki di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan, partisipasi angkatan kerja perempuan konsisten mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini kiranya wajar, mengingat wanita lebih cenderung mengurus rumah tangga apalagi yang telah menikah dan memiliki anak. Sebaliknya, laki-laki berperan sebagai tulang punggung keluarga yang aktif dalam bekerja atau pun mencari pekerjaan sehingga tingkat TPAK laki-laki menjadi lebih tinggi.

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali (persen), 2021-2023



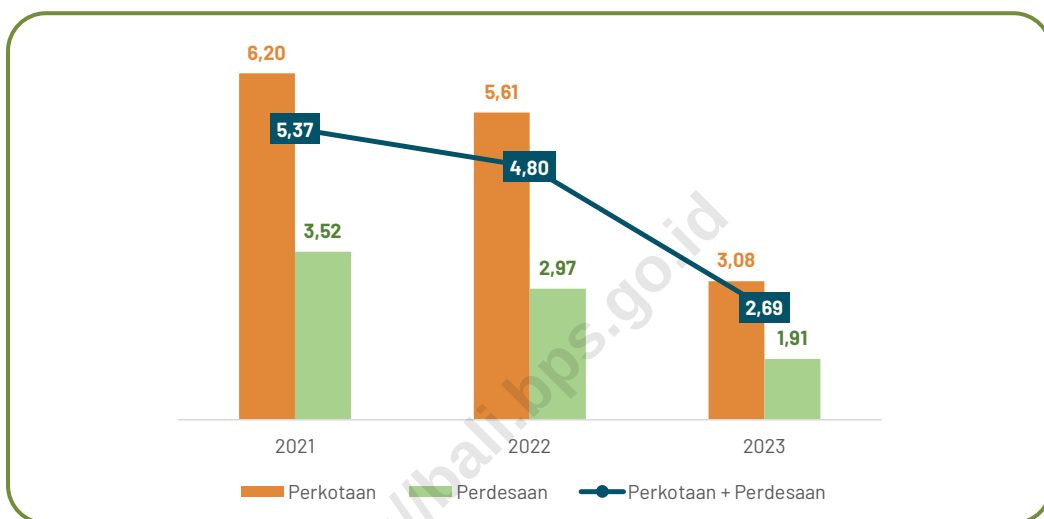
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Selain partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, serapan tenaga kerja juga perlu mendapatkan perhatian serius. Persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja disebut dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemulihan ekonomi di Bali tentu akan mendorong perbaikan pasar kerja. Lapangan pekerjaan semakin bertambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun. Pada Gambar 4.2, TPT Bali tercatat sebesar 2,69 persen di tahun 2023, turun hampir setengahnya dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,80 persen. Namun, kondisi TPT ini masih belum kembali kepada kondisi sebelum pandemi, di mana tahun 2019 TPT Bali hanya sebesar 1,57 persen.

Apabila dilihat TPT berdasarkan status wilayah, TPT di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Meskipun demikian, TPT perkotaan mengalami penurunan lebih cepat, sehingga pada tahun 2023, gap perbedaannya semakin mengecil. Dengan semakin terkonsentrasinya penduduk di perkotaan akibat aglomerasi ekonomi yang menjadi menciptakan

lapangan kerja baru, fenomena surplus tenaga kerja dapat terjadi jika pertambahan penduduk perkotaan akibat migrasi melebihi pertambahan lapangan pekerjaan baru. Sehingga, tingkat pengangguran di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan (Todaro dan Smith, 2012).

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali (persen), 2021-2023



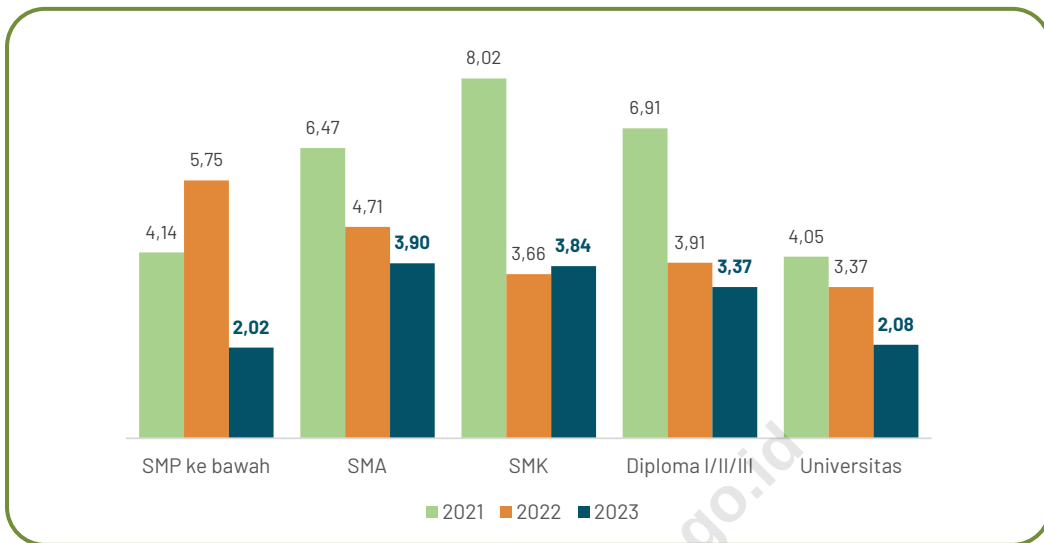
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Pengangguran dan Pendidikan

Karakteristik penganggur menurut tingkat pendidikan mencerminkan kualitas angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Kondisi ini dapat memberikan sinyal apakah kualitas tenaga kerja dari sisi pendidikan memiliki relevansi terhadap apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja.

Selama tiga tahun terakhir, TPT pada masing-masing tingkat pendidikan mengalami penurunan, kecuali pada penduduk dengan pendidikan tertinggi SMK yang sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, serta penduduk dengan pendidikan tertinggi SMP ke bawah yang sempat mengalami peningkatan dari 2021 ke 2022. Dibandingkan tahun 2022, penurunan TPT tertinggi di tahun 2023 terdapat pada tingkat pendidikan SMP ke bawah, yang menjadikan kelompok ini memiliki TPT terendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini masih menandakan bahwa lulusan SMP ke bawah cenderung mau bekerja apa saja seiring dengan kembali terbukanya lapangan pekerjaan akibat pemulihan ekonomi Bali.

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Bali (persen), 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Penduduk dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yang mengisyaratkan bahwa penduduk pada tingkat pendidikan ini memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi penganggur, serta masih relatif lemahnya daya tawar dalam memilih pekerjaan yang diinginkan. Meskipun demikian, TPT pada tingkat pendidikan ini telah mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode awal pandemi (tahun 2020), yang diharapkan juga merupakan dampak dari semakin membaiknya kurikulum dan kriteria lulusan SMA dan SMK sehingga mengurangi *miss match* dengan kebutuhan pasar kerja.

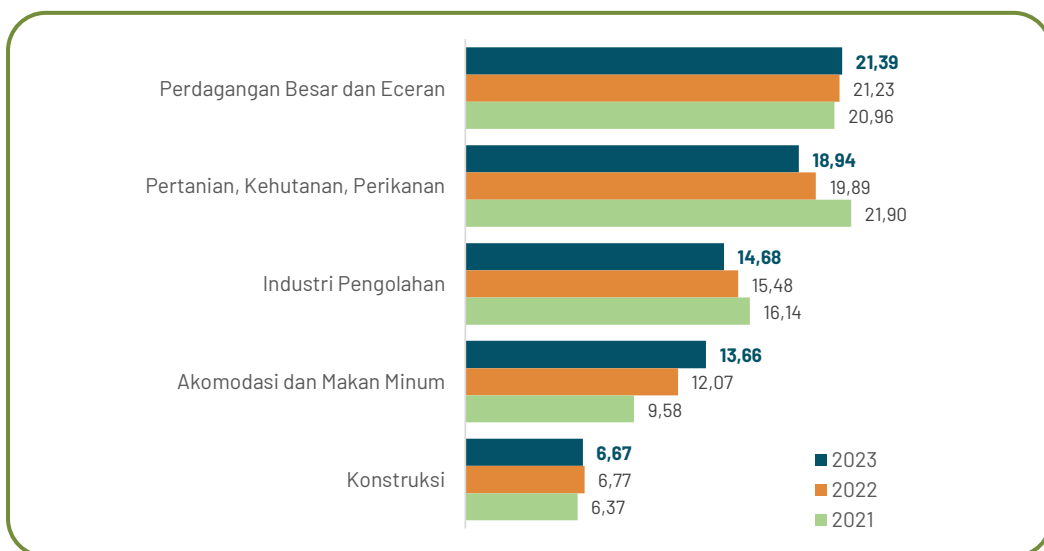
Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja. Indikator ini memberikan gambaran sektor mana yang dominan menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Berdasarkan Gambar 4.4, terlihat bahwa lima lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbesar di Bali adalah perdagangan, pertanian, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum, serta konstruksi. Selama tiga tahun terakhir, lapangan pekerjaan perdagangan serta akomodasi dan makan minum persisten mengalami peningkatan distribusi, sebaliknya lapangan pekerjaan pertanian dan industri pengolahan mengalami penurunan.

Dengan semakin membaiknya kinerja pariwisata Bali, tentu berdampak positif kepada penyerapan tenaga kerja di lapangan pekerjaan akomodasi dan makan minum. Terbukti selama tiga tahun terakhir, lapangan pekerjaan ini memberikan pertambahan penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan 16 lapangan pekerjaan lainnya. Pertambahan tenaga kerja pada sektor akomodasi dan makan minum di tahun 2022 sekitar 81 ribu orang, dan tahun 2023 sekitar 43 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.

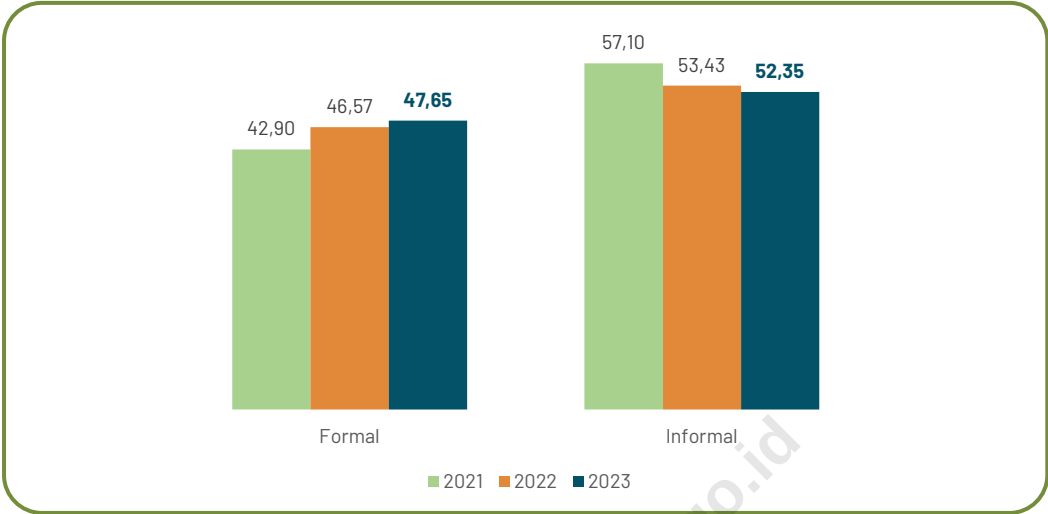
Sektor perdagangan dan pertanian merupakan dua lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja terbesar di Bali. Selain karena pariwisata yang memberikan peluang perdagangan yang besar, serta penduduk Bali yang tidak bisa lepas dari pertanian yang menjadi kearifan lokal, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua lapangan ini tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menggelutinya, melihat juga pekerja di Bali yang hampir setengahnya memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Persentase pekerja di sektor pertanian persisten mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini erat kaitannya dengan Pandemi Covid-19, di mana pada tahun 2020 saat perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam, sektor pertanian menjadi bantalan dalam penyerapan tenaga kerja agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Seiring dengan pemulihan ekonomi, sektor pertanian mulai ditinggalkan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di sektor lainnya. Sebagai informasi, sektor pertanian merupakan sektor dengan jumlah pengurangan tenaga kerja terbesar pada periode 2021-2023.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lima Lapangan Usaha Terbesar di Provinsi Bali, 2021-2023



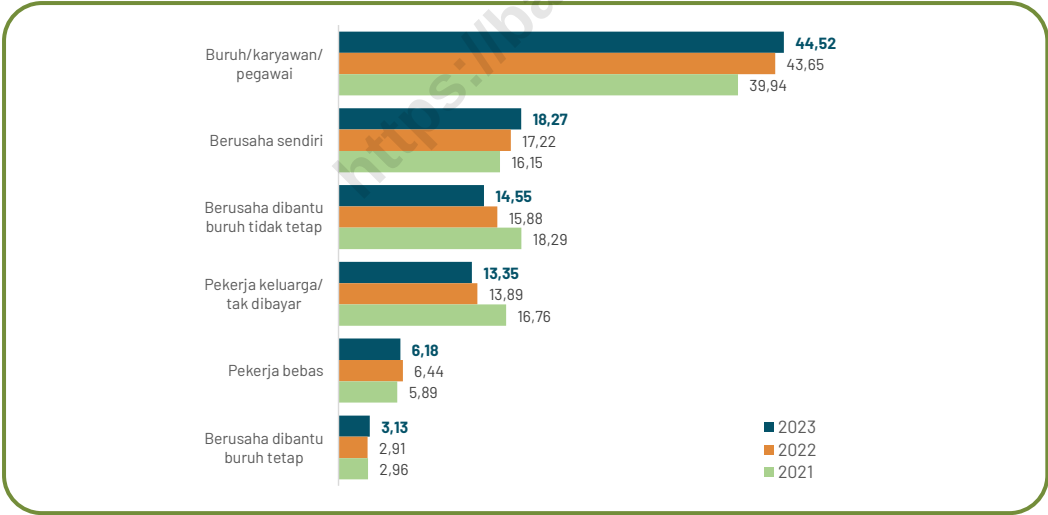
Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Gambar 4.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Formal-Informal di Provinsi Bali, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Gambar 4.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Bali, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Dalam tiga tahun terakhir, persentase pekerja formal meningkat dan sebaliknya pekerja informal menurun. Sebagaimana Gambar 4.5, peningkatan pekerja formal utamanya disebabkan karena penambahan pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dibandingkan dengan tahun 2021, pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami peningkatan sejumlah 190,04 ribu orang, sehingga jumlah pekerja yang



berstatus buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2023 sebesar 1.165,41 ribu orang, atau 44,52 persen dari seluruh pekerja di Bali. Di sisi lain, penurunan pekerja informal disebabkan karena penurunan pada pekerja yang berstatus berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap, serta pekerja keluarga/tak dibayar. Namun demikian, pekerja informal di Bali masih lebih banyak dibandingkan dengan pekerja formal, meskipun perbedaannya semakin mengecil. Pada tahun 2023, terdapat 52,35 persen pekerja informal, atau sebesar 1.370,41 ribu orang.

Pekerja dengan status pekerjaan adalah berusaha sendiri mengalami peningkatan secara persisten dalam tiga tahun terakhir. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri pada tahun 2023 sebesar 478,36 ribu orang atau 18,27 persen dari total pekerja di Bali. Semakin meningkatnya pekerja yang berusaha sendiri juga dapat dikaitkan dengan semakin banyaknya fenomena usaha yang tergolong skala kecil yang masih mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar. Mereka yang berusaha sendiri perlu mendapatkan perhatian mengingat para pekerja informal relatif lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, terlebih di tengah kondisi ketidakpastian saat ini.

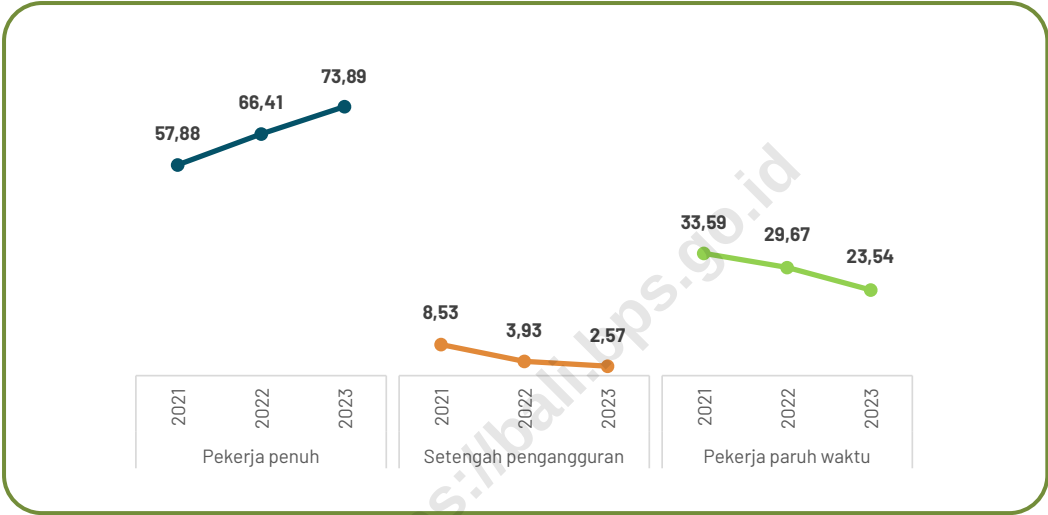
Jumlah Jam Kerja

Dalam mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pendekatan jumlah jam kerja. Berdasarkan jumlah jam kerja, penduduk bekerja dapat dibedakan menjadi Pekerja Penuh, Setengah Pengangguran, dan Pekerja Paruh Waktu. Pekerja yang dalam seminggu tercatat bekerja dalam jam kerja normal (jumlah jam kerja 35 jam atau lebih) digolongkan sebagai Pekerja Penuh. Sedangkan pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam, dibedakan menjadi dua yaitu Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu. Perbedaan dari Setengah Pengangguran dan Pekerja Paruh Waktu terletak pada tindakan dalam mencari pekerjaan lain, di mana Setengah Pengangguran masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, sedangkan sebaliknya Pekerja Paruh Waktu tidak.

Berdasarkan Gambar 4.7, persentase Pekerja Penuh pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,89 persen, persisten mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini berarti, hampir tiga perempat pekerja di Bali masih bekerja dalam jam kerja normal, sedangkan sisanya bekerja di bawah jam kerja normal. Dari pekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal, Pekerja Paruh Waktu memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan Setengah Pengangguran. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal merasa cukup dengan pekerjaan yang dimiliki sehingga

tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lainnya. Padahal ketika mereka mau menerima pekerjaan lain, secara langsung akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang mereka peroleh. Meskipun demikian, kedua kategori ini persisten mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa produktivitas pekerja di Bali semakin membaik.

Gambar 4.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Bali, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021-2023

Taraf dan Pola Konsumsi

Taraf dan pola konsumsi menggambarkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Taraf dan pola konsumsi bisa berbeda-beda antar penduduk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, demografi, pendidikan, sosial budaya, sampai kondisi perdagangan serta harga-harga barang dan jasa di wilayah tersebut. Pada umumnya konsumsi penduduk dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi juga konsumsi yang mereka keluarkan. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatan yang dimilikinya. Sehingga, pola konsumsi dapat menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

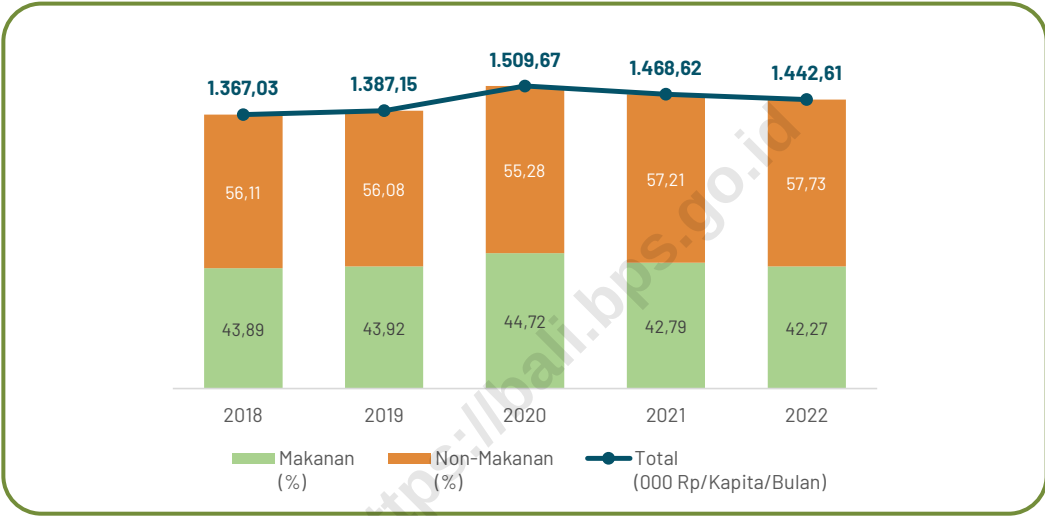
Taraf dan pola konsumsi juga dapat dikaitkan dengan kemiskinan yang tentu memiliki kesejahteraan yang rendah. Sebagaimana Hukum Engel (Zimmerman, 1932), peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pergeseran pola konsumsi dari yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan menjadi sebagian besar digunakan untuk konsumsi nonmakanan. Semakin rendah tingkat pendapatan, terdapat kecenderungan untuk mencukupi kebutuhan makanan terlebih dahulu sehingga proporsi konsumsi untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi nonmakanan.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengeluaran untuk konsumsi dapat dijadikan acuan dalam menggambarkan kesejahteraan, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Selama periode 2018-2022, rata-rata pengeluaran per kapita mengalami peningkatan pada periode 2018-2020, serta mengalami penurunan pada periode 2020-2022. Namun demikian, rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2022 yang sebesar Rp1.442.610 per bulan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya Rp1.367.030 per bulan. Potret dari Gambar 5.1

mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk karena meningkatnya pengeluaran, serta semakin besarnya proporsi pengeluaran nonmakanan, dari yang sebesar 56,11 persen pada tahun 2018 menjadi 57,73 persen pada tahun 2022. Jika dilihat lebih detail, pengeluaran nonmakanan terbesar bersumber dari komponen pengeluaran untuk perumahan, yaitu sebesar 31,34 persen pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, proporsi pengeluaran untuk perumahan persisten mengalami peningkatan.

Gambar 5.1 Pengeluaran per Kapita dan Distribusinya Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018-2022

Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2020-2022

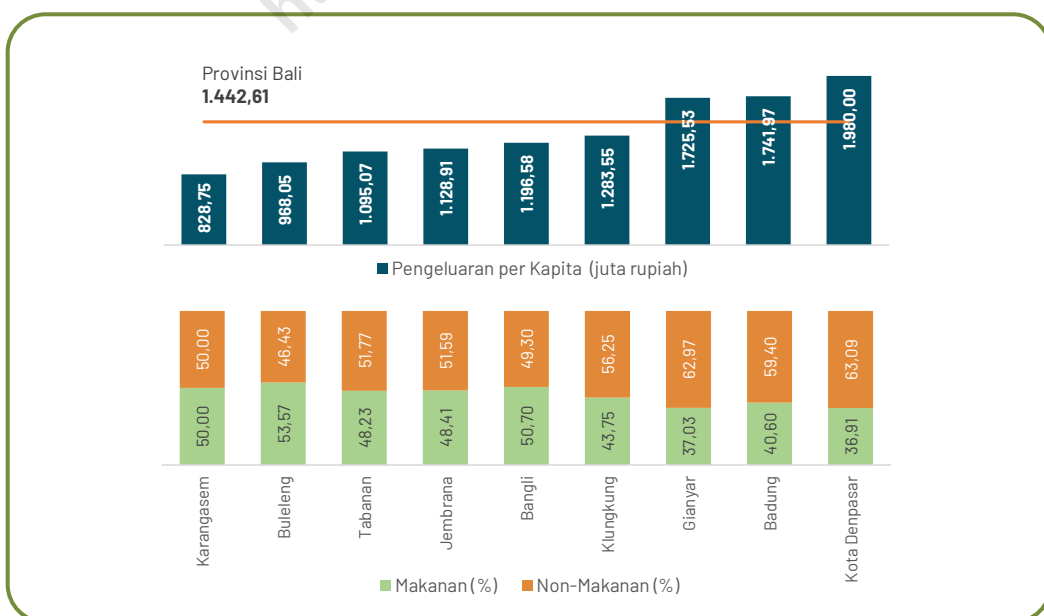
Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	44,72	42,79	45,47
Non-Makanan	55,28	57,21	54,53
- Perumahan dan fasilitas rumah tangga	22,42	25,94	31,34
- Aneka barang dan jasa	17,99	17,60	10,85
- Pajak dan asuransi	3,67	4,81	4,66
- Keperluan pesta dan upacara	4,65	4,35	4,25
- Barang tahan lama	4,82	3,31	2,34
- Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	1,72	1,19	1,07

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Terdapat disparitas pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota di Bali. Pada tahun 2022, Kota Denpasar memiliki rata-rata pengeluaran per kapita terbesar yaitu sekitar 1,98 juta rupiah per bulan. Dari Gambar 5.2, hanya tiga kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Pengeluaran per kapita terendah tercatat di Kabupaten Karangasem dengan rata-rata pengeluaran per kapita kurang dari satu juta rupiah, tepatnya sebesar 828,75 ribu rupiah, begitu juga Kabupaten Buleleng yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 968,05 ribu rupiah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, proporsi pengeluaran nonmakanan dari penduduk di Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pengeluaran makanan. Kondisi tersebut juga terjadi pada enam kabupaten/kota di Bali, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan. Sebagai wilayah dengan rata-rata pengeluaran per kapita terbesar, proporsi pengeluaran nonmakanan di Kota Denpasar menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah lainnya, yaitu sebesar 63,09 persen. Berdasarkan kondisi rata-rata pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota, terkonfirmasi bahwa, semakin tinggi pengeluaran penduduk maka semakin tinggi juga proporsi pengeluaran untuk nonmakanan.

Gambar 5.2 Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota dan Distribusi Jenis Pengeluaran di Provinsi Bali, 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Distribusi Pendapatan Penduduk

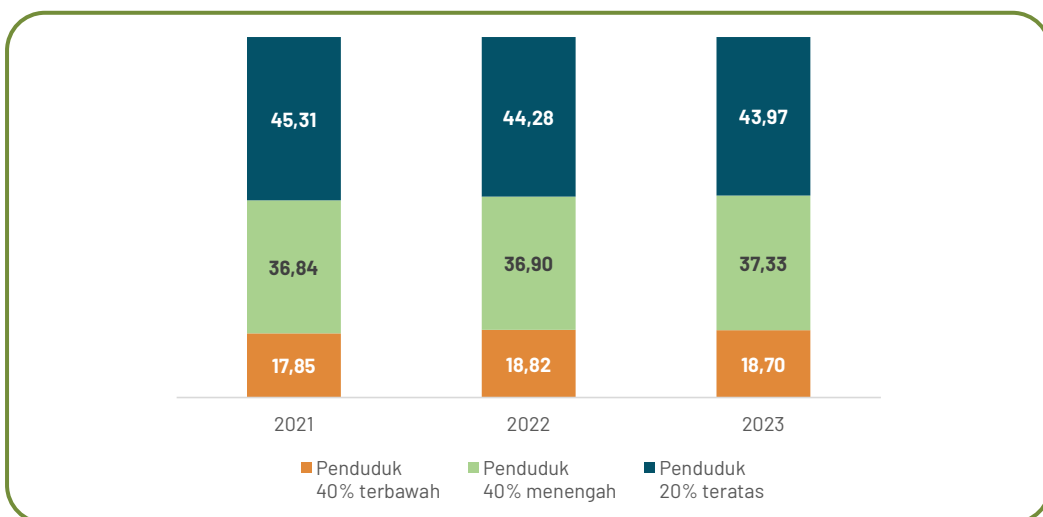
Distribusi pendapatan menggambarkan merata atau tidaknya hasil pembangunan suatu daerah yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun, hasil yang valid terkait informasi pendapatan penduduk cenderung sulit didapatkan sehingga digunakan pendekatan dalam melihat informasi pengeluaran.

Karakteristik distribusi pendapatan penduduk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Distribusi pendapatan menurut ukuran Bank Dunia (BPS, 2022) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pendapatan 40 persen terendah, kelompok pendapatan 40 persen menengah, dan 20 persen tertinggi. Merujuk kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh proporsi pendapatan dari kelompok pendapatan 40 persen terendah terhadap total pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

- a. jika proporsinya < 12 persen, maka tingkat ketimpangan tinggi,
- b. jika proporsinya 12–17 persen, maka tingkat ketimpangan sedang,
- c. jika proporsinya > 17 persen, maka tingkat ketimpangan rendah.

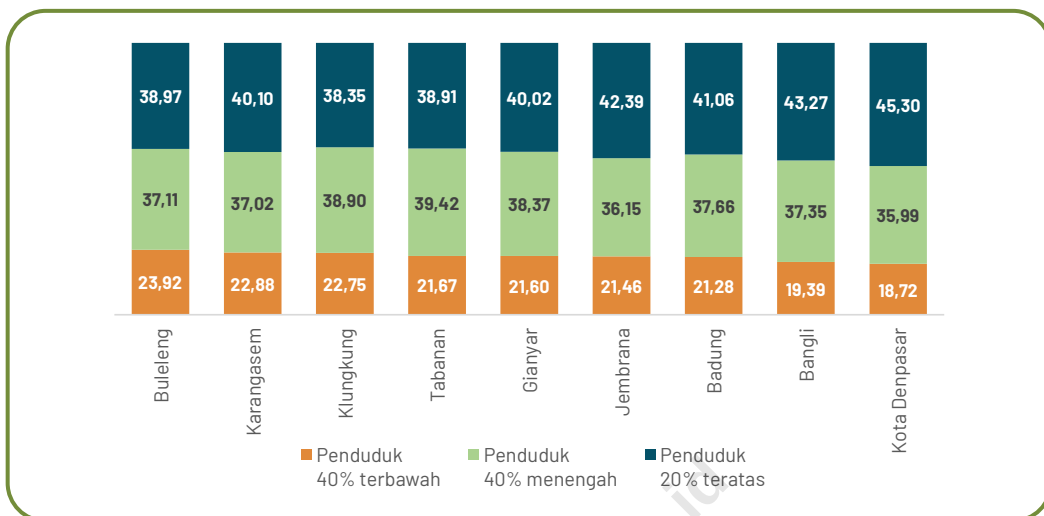
Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Bali berdasarkan kriteria Bank Dunia telah berada pada kategori ketimpangan rendah. Fakta ini ditunjukkan dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen terendah yang lebih dari 17 persen pada tahun 2023, yaitu sebesar 18,70 persen. Namun, persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (Gambar 5.3).

Gambar 5.3 Distribusi Pendapatan Provinsi Bali, 2021–2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Gambar 5.4 Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Seluruh kabupaten/kota di Bali pada tahun 2022 berada pada kategori ketimpangan rendah, di mana persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah lebih dari 17 persen. Kabupaten Buleleng memiliki persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbesar, yaitu 23,92 persen. Di sisi lain, Kota Denpasar memiliki persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terkecil, yaitu 18,72 persen, yang dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Denpasar cenderung lebih tinggi.

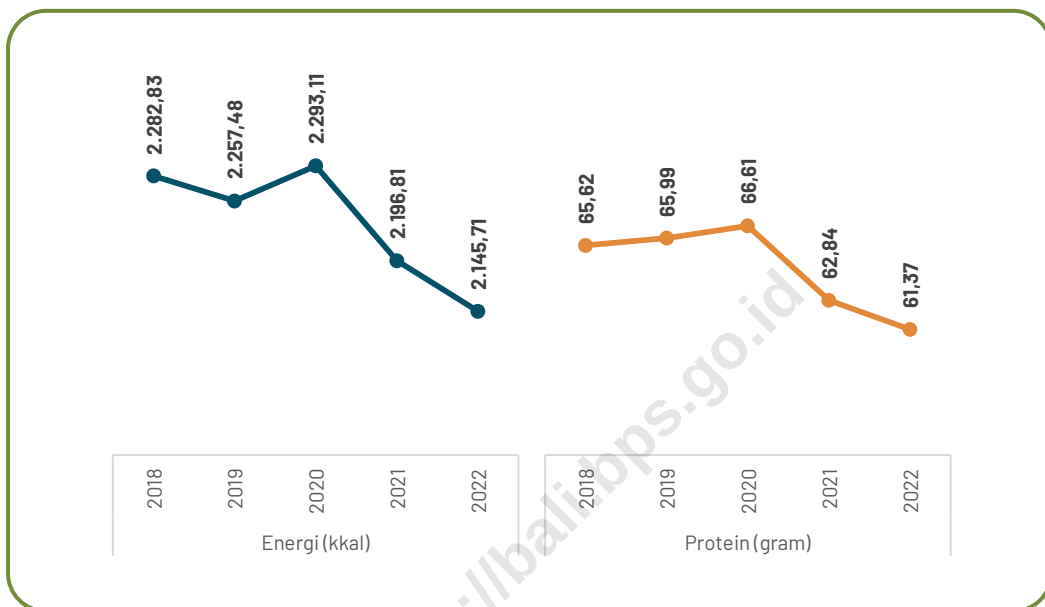
Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan energi dan protein menjadi salah satu indikator untuk memantau kondisi gizi yang secara tidak langsung menjadi cerminan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selama dua tahun terakhir, rata-rata konsumsi energi dari penduduk di Bali cenderung mengalami penurunan. Konsumsi energi menurun sebesar 2,33 persen, dari 2.196,81 kkal pada tahun 2021 menjadi 2.145,71 kkal pada tahun 2022. Namun demikian, tingkat konsumsi energi pada tahun 2022 masih berada di atas batas angka kecukupan yang dianjurkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 sebesar 2.100 kkal per kapita per hari.

Selain konsumsi energi yang menurun, rata-rata konsumsi protein penduduk Bali juga cenderung mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, berdasarkan Gambar 5.5. Konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2022 menurun sebesar 2,34 persen, dari 62,84 gram pada tahun 2021 menjadi 61,37 gram. Namun jika disandingkan dengan angka kecukupan

protein sebesar 57 gram per kapita per hari berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, konsumsi protein penduduk Bali sudah di atas standar yang dianjurkan.

Gambar 5.5 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Bali, 2018-2022

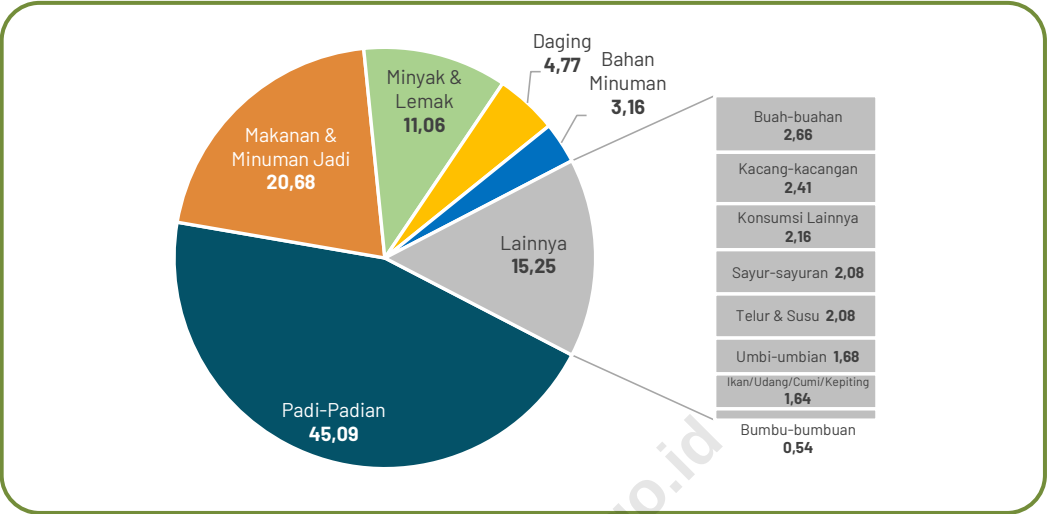


Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018-2022

Penurunan konsumsi energi dan protein ini tidak dapat lepas dari faktor ekonomi masyarakat Bali yang masih terdampak Pandemi Covid-19 sampai tahun 2022. Di sisi lain, pada saat pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, terjadi kenaikan harga minyak goreng yang hampir menyentuh dua kali lipat, sehingga memaksa masyarakat untuk membatasi konsumsi makanannya.

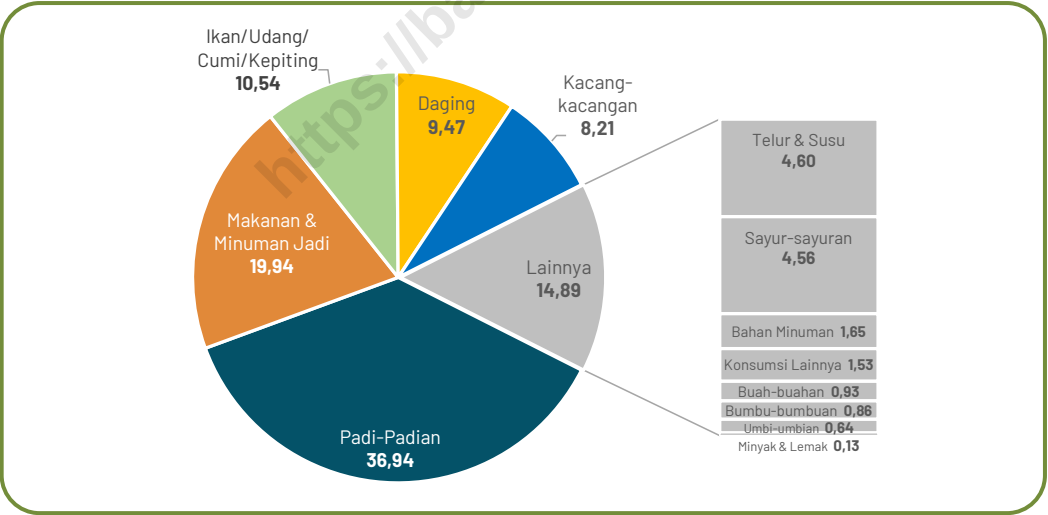
Asupan energi dan protein bisa bersumber dari berbagai komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Sebagian besar energi dan protein bersumber dari komoditas padi-padian. Sebagai sumber energi kontribusinya tercatat sekitar 45,09 persen (Gambar 5.6). Sementara sumbangan protein dari komoditas ini sekitar 36,94 persen. Konsumsi terbesar kedua adalah makanan dan minuman jadi, memberikan sumbangan masing-masing sekitar 20,68 persen sebagai sumber energi dan 19,94 persen sebagai sumber protein. Selanjutnya, minyak dan lemak menjadi sumber energi utama ketiga dengan sumbangan sekitar 11,06 persen. Sedangkan sumber protein utama ketiga berasal dari kelompok ikan/udang/cumi/kepiting dengan sumbangan sebesar 10,54 persen.

Gambar 5.6 Persentase Konsumsi Energi per Kapita Menurut Sumber Energi di Provinsi Bali, 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Gambar 5.7 Persentase Konsumsi Protein per Kapita Menurut Sumber Protein di Provinsi Bali, 2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan juga faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam perkembangannya, rumah tidak hanya digunakan sebagai tempat berlindung tetapi rumah juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Semakin tinggi kualitas bahan bangunan rumah serta fasilitas yang digunakan, mencerminkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penghuninya.

Rumah layak huni merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur capaian Tujuan 11 SDGs yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Klasifikasi rumah layak huni dilakukan dengan mempertimbangkan empat kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya, yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*) yang dilihat dari jenis atap, dinding, dan lantai, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses terhadap layanan sumber air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak (BPS, 2022).

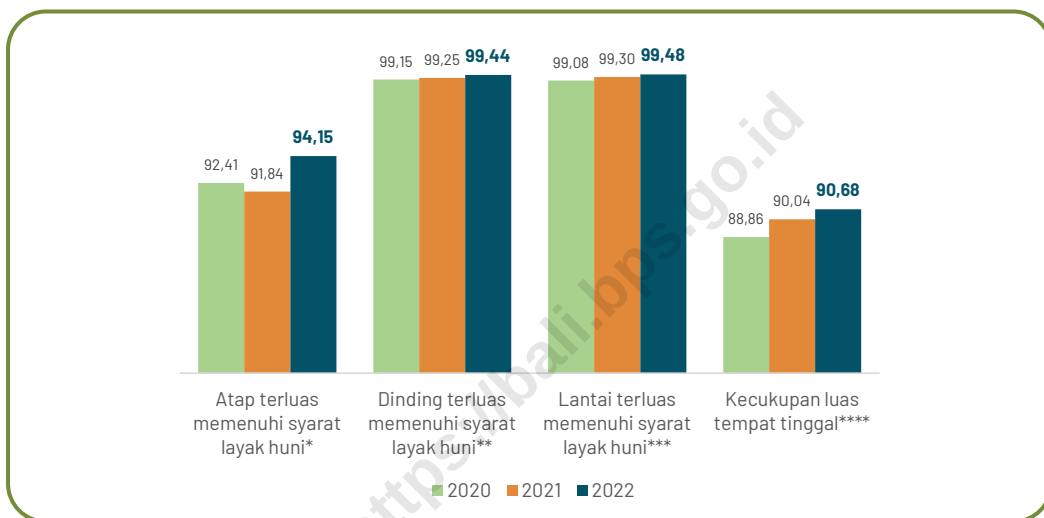
Kriteria Rumah Layak Huni

Pada bagian ini, kriteria rumah layak huni yang dibahas lebih kepada ketahanan bangunan dan kecukupan luas tempat tinggal. Penjelasan kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah memenuhi syarat:
 - i. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah beton, genteng, kayu/sirap, dan seng.

- ii. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
 - iii. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.
- b. Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas tanah per kapita dari bangunan tempat tinggal > 7,2 m².

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Kriteria Rumah Layak Huni di Provinsi Bali, 2020-2022



Catatan: *Atap terluas yang memenuhi syarat layak huni yaitu bahan atap terluasnya adalah beton, genteng, kayu/sirap, atau seng.

**Dinding terluas memenuhi syarat layak huni yaitu bahan dinding terluasnya adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu.

***Lantai terluas memenuhi syarat layak huni yaitu bahan lantai terluasnya adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah.

****Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas tanah per kapita dari bangunan tempat tinggal > 7,2 m².

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Berdasarkan Gambar 6.1, persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal memenuhi kriteria rumah layak secara umum semakin meningkat pada periode 2020-2022. Lebih dari 90 persen rumah tangga di Bali pada tahun 2022 memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat atap, dinding, atau lantai yang sesuai dengan kriteria ketahanan bangunan, serta sesuai kriteria kecukupan luas tempat tinggal.

Jika dilihat dari syarat yang tidak terpenuhi, sekitar 5,85 persen rumah tangga di Bali memiliki rumah yang atap terluasnya berbahan asbes, jerami/ijuk/daun/rumbia, atau lainnya. Dari jenis dinding terluas, sebanyak 0,56

persen rumah tangga memiliki dinding bambu/anyaman bambu atau lainnya. Sedangkan dari lantai terluas, sebanyak 0,52 persen rumah tangga memiliki lantai bambu, tanah, atau lainnya.

Syarat dinding dan lantai merupakan paling banyak yang telah dipenuhi, yaitu masing-masing sebesar 99,44 persen dan 99,48 persen pada tahun 2022. Sedangkan, dari kriteria kecukupan tempat tinggal, sebanyak 7,14 persen rumah tangga di Bali memiliki luas lantai per kapita 7,3–9,9 m² dan sisanya yaitu 83,54 persen rumah tangga memiliki luas lantai per kapita 10 m² ke atas. Dari masing-masing syarat bahan bangunan, mayoritas rumah tangga di Bali memiliki jenis atap terluas adalah beton/genteng (81,65 persen), jenis dinding terluas adalah tembok (98,31 persen), dan jenis lantai terluas adalah marmer/granit/keramik (82,44 persen).

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Bahan Bangunan Tempat Tinggal yang Paling Banyak Digunakan, dan Kecukupan Luas Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2022

Kabupaten/Kota	Atap: beton/ genteng	Dinding: tembok	Lantai: marmer/ granit/keramik	Luas per kapita > 7,2 m ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jembrana	97,72	97,93	73,48	100,00
Tabanan	93,78	98,32	85,06	86,99
Badung	95,31	98,62	93,26	89,69
Gianyar	97,20	99,55	95,41	92,66
Bangli	95,16	99,04	89,30	100,00
Klungkung	64,44	96,06	68,50	96,77
Karangasem	80,64	98,68	68,99	90,16
Buleleng	46,05	96,65	63,42	94,53
Kota Denpasar	82,62	99,04	91,85	83,96
Provinsi Bali	81,65	98,31	79,88	90,68

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga terbesar yang memiliki jenis dinding terluas adalah tembok dan jenis lantai terluas adalah marmer/granit/keramik yaitu masing-masing 99,55 persen dan 95,41 persen. Selain itu, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga terbesar yang memiliki jenis atap terluas adalah beton/genteng yaitu sebanyak 97,72 persen. Seluruh rumah tangga di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli memiliki luas lantai per kapita di atas 7,2 m² atau seluruh rumah tangga telah memenuhi kriteria kecukupan luas tempat tinggal, sebagaimana Tabel 6.1.

Fasilitas Perumahan yang Dimiliki

Selain kondisi fisik bangunan, kriteria lain dari tempat tinggal yang layak adalah ketersediaan fasilitas perumahan. Sebuah rumah yang sehat dan nyaman untuk ditempati dapat dilihat dari kondisi fasilitas perumahan yang paling mendasar, seperti sarana air minum, sanitasi, listrik, dan bahan bakar untuk memasak. Ketersediaan fasilitas perumahan pada gilirannya akan menentukan kualitas hidup dari penghuninya.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Perumahan di Provinsi Bali, 2020-2022

Fasilitas Perumahan	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber air minum bersih*	88,44	87,07	88,73
Akses air minum layak**	97,36	97,56	98,42
Kloset menggunakan leher angsa	99,44	99,26	99,03
Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik/IPAL	98,78	99,30	99,20
Sumber penerangan listrik	99,87	99,91	99,99
Bahan bakar untuk memasak adalah listrik/gas	82,44	83,31	87,81

Catatan: *Sumber air minum bersih adalah jika sumber air berasal dari air kemasan/air isi ulang, leding, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja ≥ 10 m.

**Akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih dan akses air minum layak mengalami peningkatan. Terlihat pada Tabel 6.2, rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih meningkat 1,66 persen poin, dari 87,07 persen pada tahun 2021 menjadi 88,73 persen pada tahun 2022. Begitu juga dengan akses air minum layak, di mana sebesar 98,42 persen pada tahun 2022 atau meningkat 0,86 persen poin dari tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara sumber air minum bersih dan akses air minum layak semakin berkurang. Perbedaan utama dari kedua kategori tersebut terletak pada pertimbangan terhadap jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja, di mana sumber air minum bersih telah mempertimbangkan jarak tersebut dengan kriteria ≥ 10 m. Selain itu, tingginya persentase pada kedua kategori ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga di Bali memiliki kualitas air minum yang baik.



Fasilitas sanitasi juga menjadi kriteria tempat tinggal yang layak dan sehat. Sanitasi yang layak dan sehat dapat dilihat dari jenis kloset yang menggunakan leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik atau instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Pada tahun 2022, rumah tangga yang jenis klosetnya adalah leher angsa sebesar 99,03 persen, mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin dari tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada tempat pembuangan akhir tinja yang menggunakan tangki septik/IPAL, menurun 0,10 persen poin pada tahun 2022 menjadi sebesar 99,20 persen. Meskipun mengalami sedikit penurunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk Bali akan pentingnya sanitasi yang layak dan sehat tergolong tinggi.

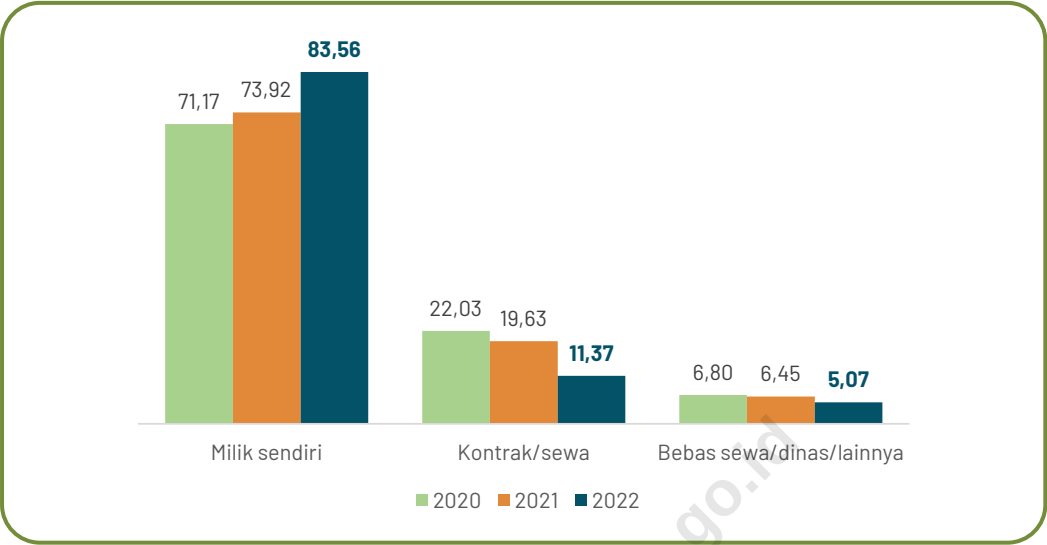
Dari sisi penerangan tempat tinggal, listrik menjadi sumber penerangan dan sumber energi utama nasional. Pemerataan akses terhadap listrik merupakan target kinerja pemerintah untuk mewujudkan hasil pembangunan yang secara merata dapat dirasakan seluruh penduduk. Secara umum di Bali, hampir semua rumah tangga sudah mendapat akses terhadap listrik. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik tercatat mencapai 99,99 persen. Jika dilihat lebih detail, masih terdapat rumah tangga yang sumber penerangannya bukan listrik di Bali, yaitu di Kabupaten Karangasem.

Selain sumber penerangan, kebutuhan energi untuk rumah tangga juga diperlukan untuk bahan bakar memasak. Sebagian besar rumah tangga di Bali menggunakan bahan bakar gas/listrik untuk keperluan memasak. Kebutuhan akan gas/listrik sebagai bahan bakar semakin meningkat selama periode 2020-2022. Tercatat 82,44 persen rumah tangga pada tahun 2020, meningkat menjadi 83,31 persen pada tahun 2021 dan mencapai 87,81 persen pada tahun 2022.

Status Kepemilikan Tempat Tinggal

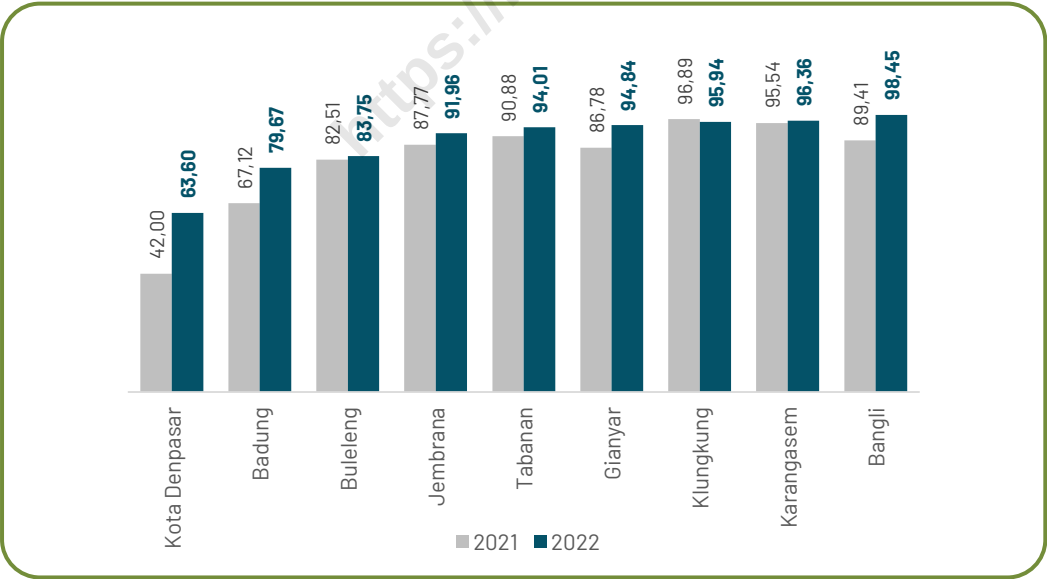
Kesejahteraan penduduk semakin tinggi ketika status kepemilikan tempat tinggal yang dihuni merupakan milik sendiri. Karena status kepemilikan rumah tinggal menunjukkan tingkat akses terhadap pemenuhan kebutuhan papan serta kepemilikan aset rumah tangga. Di Bali, rumah tangga yang tempat tinggalnya milik sendiri pada tahun 2022 sebesar 83,56 persen, kondisinya semakin meningkat dibandingkan periode 2020-2021. Di sisi lain, masih terdapat rumah tangga yang tempat tinggalnya berstatus sewa/kontrak, namun persentasenya semakin menurun. Pada tahun 2022 rumah tangga yang tempat tinggalnya berstatus sewa/kontrak hanya sebesar 11,37 persen, sebagaimana Gambar 6.2.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Provinsi Bali, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Milik Sendiri di Provinsi Bali, 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022

Berdasarkan Gambar 6.3, hanya 63,60 persen rumah tangga di Kota Denpasar yang tempat tinggalnya merupakan milik sendiri. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya harga perumahan dan tanah di Kota Denpasar. Sehingga



penyewaan/kontrak rumah menjadi pilihan bagi sebagian rumah tangga yang tinggal di Kota Denpasar. Tercatat persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya sewa/kontrak di wilayah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, yaitu sebesar 32,74 persen. Kondisi di Kabupaten Badung juga mirip dengan Kota Denpasar, di mana persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya milik sendiri relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, tetapi persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya sewa/kontrak lebih tinggi. Namun, persentase rumah tangga yang tempat tinggalnya milik sendiri mengalami peningkatan yang relatif lebih tinggi pada periode 2021-2022, yaitu masing-masing 21,60 persen poin untuk Kota Denpasar dan 12,55 persen poin untuk Kabupaten Badung.

<https://bali.bps.go.id>

Tingkat kemiskinan menjadi tolok ukur utama dari kesejahteraan penduduk, semakin rendah tingkat kemiskinan mencerminkan kesejahteraan penduduk yang semakin membaik. Kemiskinan masih menjadi tantangan yang menghambat pembangunan berkelanjutan di banyak belahan dunia. Tujuan pertama yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyebutkan bahwa kemiskinan harus diakhiri dalam segala bentuk dan di semua tempat. Untuk itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus melibatkan seluruh pihak dalam memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang tanpa terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

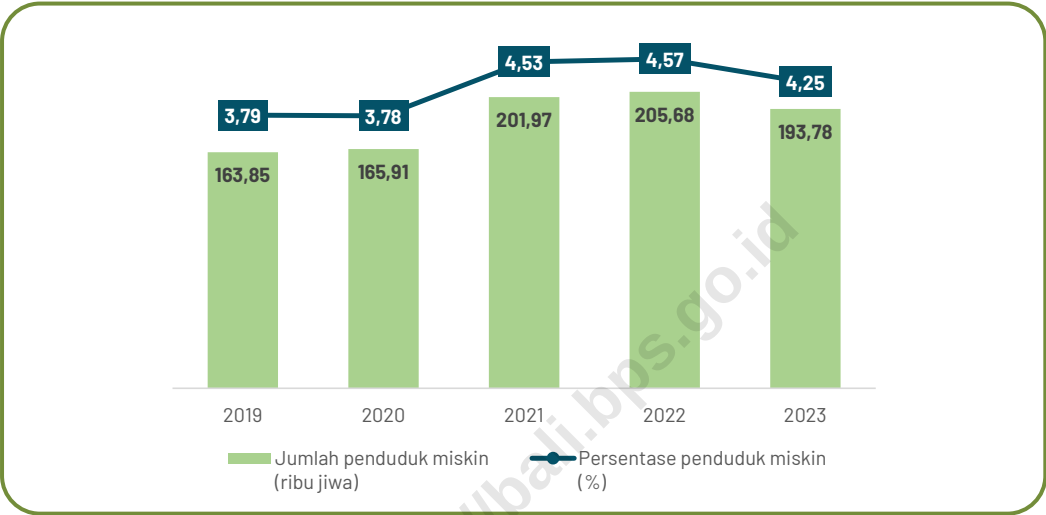
Kemiskinan yang diukur oleh BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada konsep kebutuhan dasar, kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan dari sisi pengeluaran. Seseorang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan minimum nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Untuk kebutuhan makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2.100 kilo kalori per hari.

Perkembangan Penduduk Miskin

Seiring dengan pemulihan ekonomi Bali yang menciptakan lapangan kerja baru, pendapatan penduduk juga semakin membaik dan pada gilirannya membantu mengurangi jumlah penduduk miskin. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Bali tahun 2023 sebanyak 193,78 ribu jiwa, turun 11,9

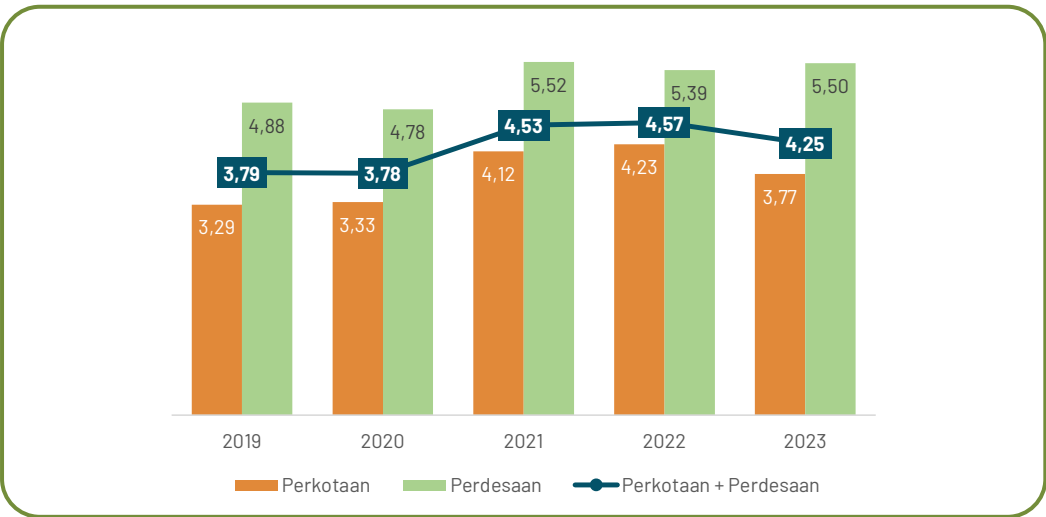
ribu jiwa dibandingkan tahun 2022 (Gambar 7.1). Jika dilihat berdasarkan persentasenya, sebanyak 4,25 persen penduduk Bali yang tergolong miskin, turun 0,32 persen poin dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini merupakan yang terendah pasca Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, namun belum kembali kepada kondisi sebelum pandemi baik dari jumlah maupun persentasenya.

Gambar 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023

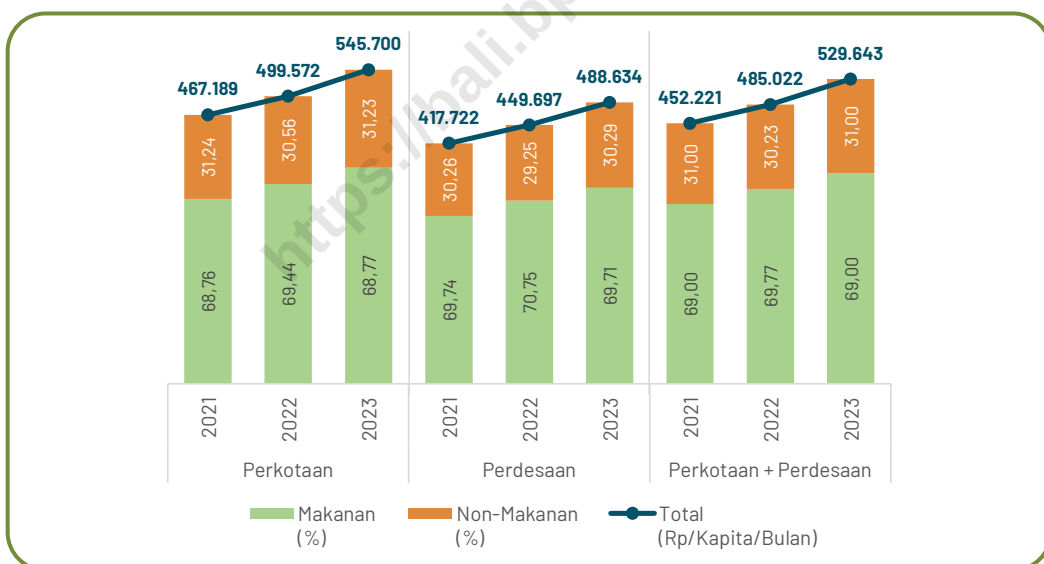


Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Berdasarkan Gambar 7.2, wilayah perdesaan di Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Pada tahun 2023, sebanyak 5,50 persen penduduk perdesaan tergolong miskin, sedangkan penduduk miskin di perkotaan hanya sekitar 3,77 persen. Hal ini disebabkan karena wilayah perdesaan memiliki keterbatasan akses terhadap peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan wilayah perkotaan, seperti akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik.

Berbeda dengan tingkat kemiskinan di perkotaan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, tingkat kemiskinan di perdesaan justru mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berdampak kepada semakin melebarnya gap tingkat kemiskinan antar kedua wilayah. Namun, dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2023 sekitar 123,82 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir setengahnya, yaitu 69,96 ribu jiwa.

Gambar 7.3 Garis Kemiskinan Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Jika ditinjau dari garis kemiskinan, seiring dengan inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun, berdampak kepada semakin meningkatnya garis kemiskinan, sebagaimana Gambar 7.3. Garis kemiskinan Bali pada tahun 2023 sebesar Rp529.643 per kapita per bulan, meningkat 9,20 persen dibandingkan garis kemiskinan tahun 2022. Dilihat per rumah tangga, garis kemiskinan Bali sebesar Rp2.176.833 per rumah tangga miskin per bulan, dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebesar 4,11 atau empat sampai lima orang.

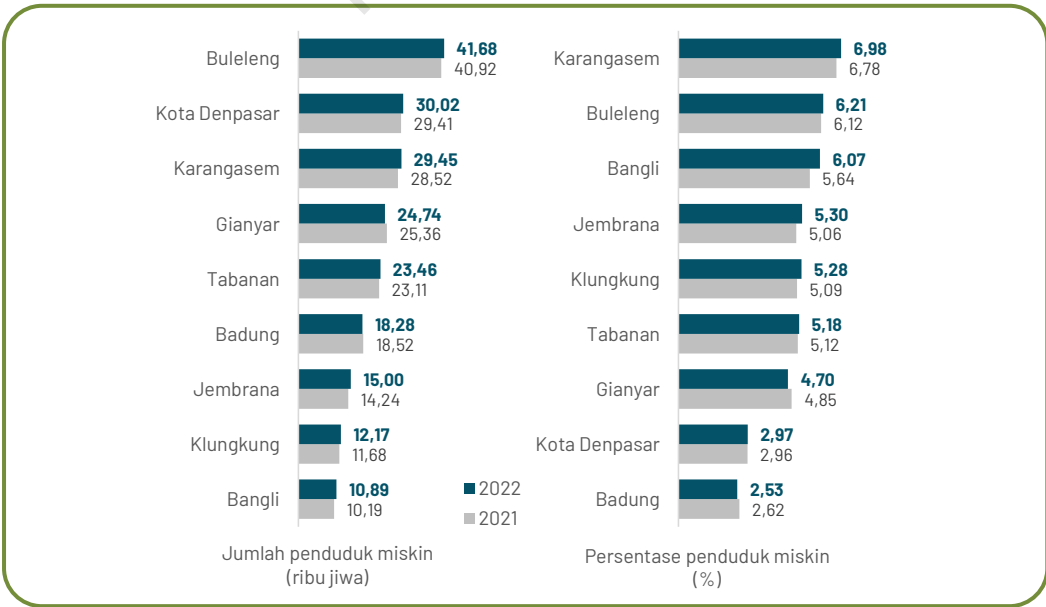
Komoditas makanan memberikan sumbangan lebih besar yaitu 69,00 persen dibandingkan dengan nonmakanan yang hanya 31,00 persen. Tiga komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras.

Menurut wilayah, garis kemiskinan di perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Garis kemiskinan di perkotaan pada tahun 2023 sebesar Rp545.700 per kapita per bulan, sementara di perdesaan sebesar Rp488.634 per kapita per bulan. Perbedaan garis kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan sebesar Rp57.066 per kapita per bulan, kondisinya semakin melebar dibandingkan tahun 2022 yang perbedaannya sebesar Rp49.875 per kapita per bulan. Komoditas makanan memberikan sumbangan lebih besar di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan.

Kemiskinan Kabupaten/Kota

Sampai dengan pembuatan publikasi ini, data kemiskinan tahun 2023 belum dirilis untuk tingkat kabupaten/kota. Sehingga penjelasan kondisi kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Bali akan menggunakan data kemiskinan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Gambaran kemiskinan juga melihat baik dari sisi jumlah maupun persentase yang dapat dilihat pada Gambar 7.4.

Gambar 7.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2022



Jumlah penduduk miskin terbanyak di Bali berada di Kabupaten Buleleng, namun persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Karangasem. Hampir seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin di tahun 2022, kecuali Kabupaten Gianyar dan Badung. Peningkatan terbesar dari sisi jumlah penduduk miskin berada di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 0,93 ribu jiwa, sedangkan dari sisi persentase penduduk miskin berada pada Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,43 persen poin.

Beberapa fenomena menarik lainnya yang dapat ditangkap adalah wilayah metropolitan Sarbagita yang terdiri dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan memiliki persentase penduduk miskin terendah. Fakta ini tidak lepas dari bahwa pada wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi yang memberikan peluang lebih besar dalam peningkatan pendapatan penduduk. Selain itu, meskipun Kabupaten Bangli memiliki jumlah penduduk miskin terendah, secara persentase kabupaten ini merupakan yang tertinggi ketiga.

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

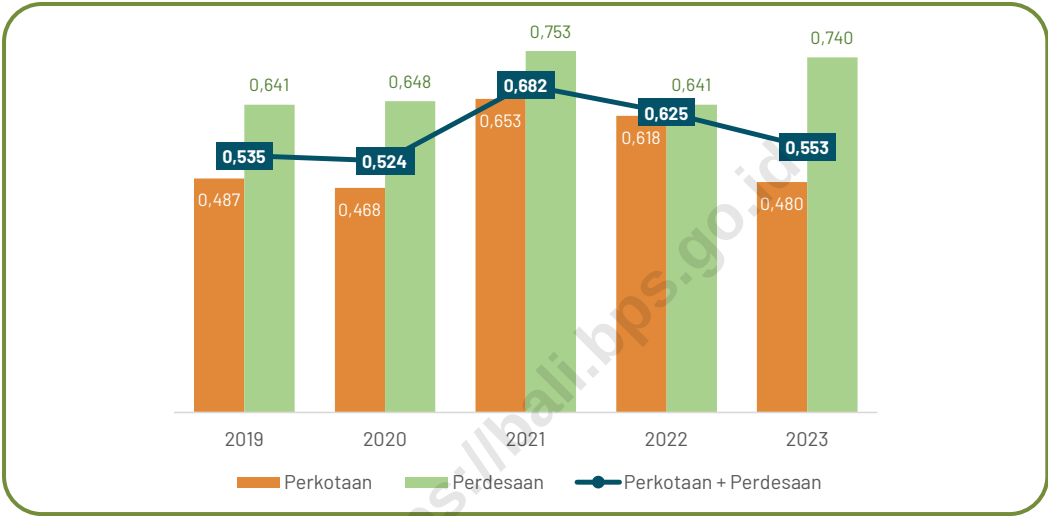
Selain garis kemiskinan, Indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dengan mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan semakin tinggi nilai P2, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Besaran P1 dan P2 Bali disajikan pada Gambar 7.5 dan 7.6

Indeks kedalaman kemiskinan Bali pada tahun 2023 adalah sebesar 0,553, persisten mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dengan semakin rendahnya indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan bahwa kecepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin – yang direpresentasikan dengan nilai pengeluaran – lebih cepat dibandingkan peningkatan garis kemiskinan. Berdasarkan status wilayah, indeks kedalaman kemiskinan perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan dan juga persisten mengalami penurunan, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan perdesaan justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

Indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan pola yang sama. Selama tiga tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Bali persisten mengalami

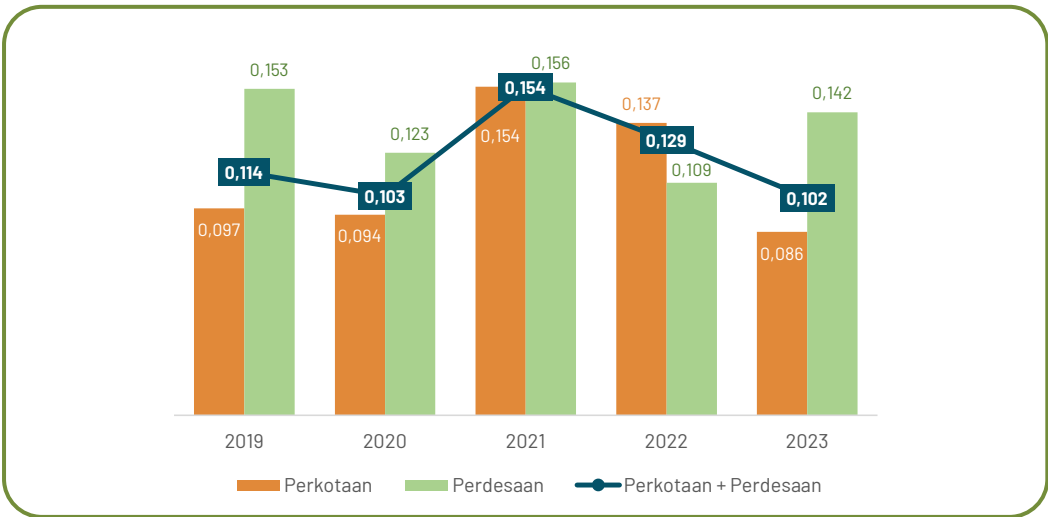
penurunan dan telah berada pada level yang sama dengan kondisi sebelum pandemi. Indeks keparahan kemiskinan perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dan perbedaannya semakin besar dengan indeks keparahan kemiskinan perkotaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa disparitas pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan memang lebih besar daripada di perkotaan, dan disparitasnya semakin besar.

Gambar 7.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Gambar 7.6 Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Menurut Status Wilayah di Provinsi Bali, 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-2023

Luasnya dimensi kesejahteraan kiranya masih bisa dijelaskan dari sudut pandang berbeda. Terdapat beberapa aspek sosial lainnya yang berdampak terhadap perubahan taraf kesejahteraan rakyat yang belum terangkum pada penjelasan sebelumnya. Aspek sosial tersebut antara lain akses terhadap bantuan sosial, akses terhadap informasi dan komunikasi, serta fenomena tindak kejahatan. Gaya hidup masyarakat perlahan mengalami perubahan dan semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi informasi, menjadikan mereka memiliki akses yang terbuka lebar terhadap dunia luar. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

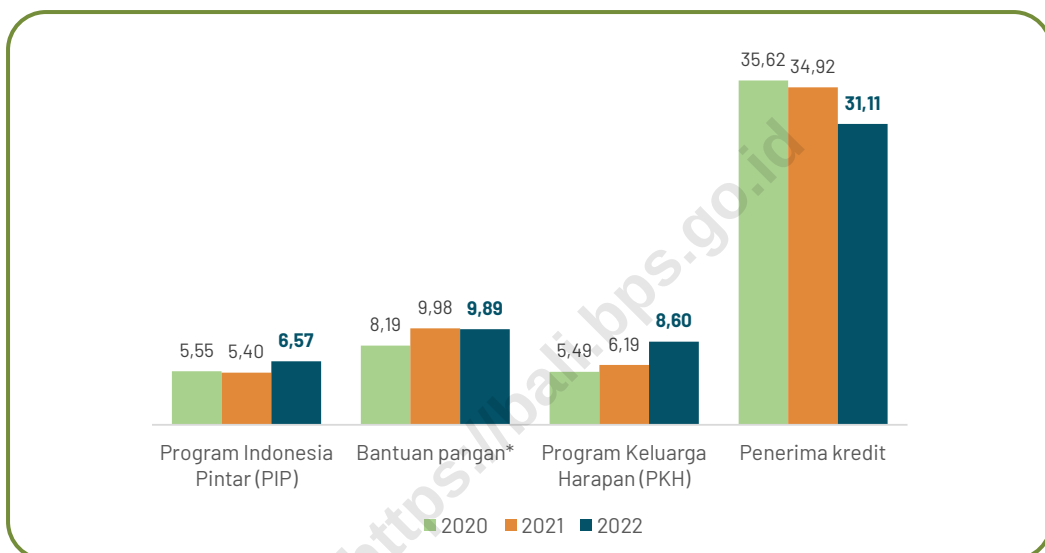
Akses terhadap Perlindungan Sosial

Pemerintah masih terus mengupayakan berbagai program perlindungan sosial yang inklusif sehingga kesejahteraan bersama dapat dicapai. Upaya tersebut sejalan dengan target 1.3 pada tujuan pertama SDGs, yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin. Beberapa program perlindungan sosial yang akan dijelaskan adalah Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pangan, serta Program Keluarga Harapan (PKH).

PIP merupakan program pemerintah yang berfokus untuk memberikan dukungan pendidikan kepada peserta didik (6–21 tahun) dari keluarga kurang mampu dalam upaya mencegah mereka dari putus sekolah dan menarik mereka yang telah putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2022, terdapat 6,57 persen rumah tangga yang di dalamnya terdapat anggota rumah tangga penerima PIP. Kondisi tersebut meningkat sebesar 1,17 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021 (Gambar 8.1). Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada Tabel 8.1 terlihat bahwa Kabupaten Tabanan memiliki

persentase rumah tangga penerima PIP terbesar yaitu 11,76 persen dari seluruh rumah tangga di kabupaten tersebut. Salah satu penyebab kenaikan penerima PIP karena adanya peraturan baru yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek No.14 tahun 2022, yang mengatur jadwal pencairan dana PIP menjadi 3 kali dalam setahun. Pencairan dana PIP ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana dana PIP dicairkan setahun sekali secara serentak.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Menurut Jenis Bantuan Sosial di Provinsi Bali, 2020-2022



Catatan: *Bantuan pangan terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako
 Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Pemberian bantuan pangan terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako. BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 110.000 rupiah setiap bulannya. Sedangkan Bantuan Sembako merupakan pengembangan dari BPNT yang dilakukan mulai tahun 2020. Besaran yang diterima KPM yang memperoleh Program Sembako adalah 150.000 rupiah. Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang menerima bantuan pangan sebesar 9,89 persen, sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021, namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Sebagai wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Bali, Kabupaten Karangasem juga menjadi kabupaten dengan persentase rumah tangga penerima bantuan pangan tertinggi, yaitu mencapai 24,41 persen. Di sisi lain, Kota Denpasar tercatat hanya sebesar 1,52 persen rumah tangga yang menerima bantuan pangan pada tahun 2022.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bantuan Sosial di Provinsi Bali, 2022

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial			
	Program Indonesia Pintar (PIP)	Bantuan pangan	Program Keluarga Harapan (PKH)	Menerima kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jembrana	4,86	11,98	13,09	32,07
Tabanan	11,76	14,50	14,84	35,28
Badung	3,47	3,39	4,14	29,87
Gianyar	7,03	10,36	9,11	44,31
Klungkung	9,27	9,77	12,89	32,05
Bangli	11,70	13,26	9,66	45,73
Karangasem	10,25	24,41	12,50	25,99
Buleleng	11,55	14,38	13,70	32,61
Denpasar	0,44	1,52	1,24	21,72
Provinsi Bali	6,57	9,89	8,60	31,11

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Selain bantuan sosial pangan, upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah dengan menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan PKH terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen (misalkan terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, atau lansia). Harapannya dengan PKH, keluarga miskin dan sangat miskin lebih mudah untuk mendapatkan akses kepada pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Persentase rumah tangga yang menjadi penerima PKH di Bali mengalami peningkatan pada periode 2020-2022, dan di tahun 2022 menjadi sebesar 8,60 persen. Kabupaten Tabanan memiliki persentase rumah tangga penerima PKH terbesar, di mana sebesar 14,84 persen rumah tangga di kabupaten ini menerima PKH.

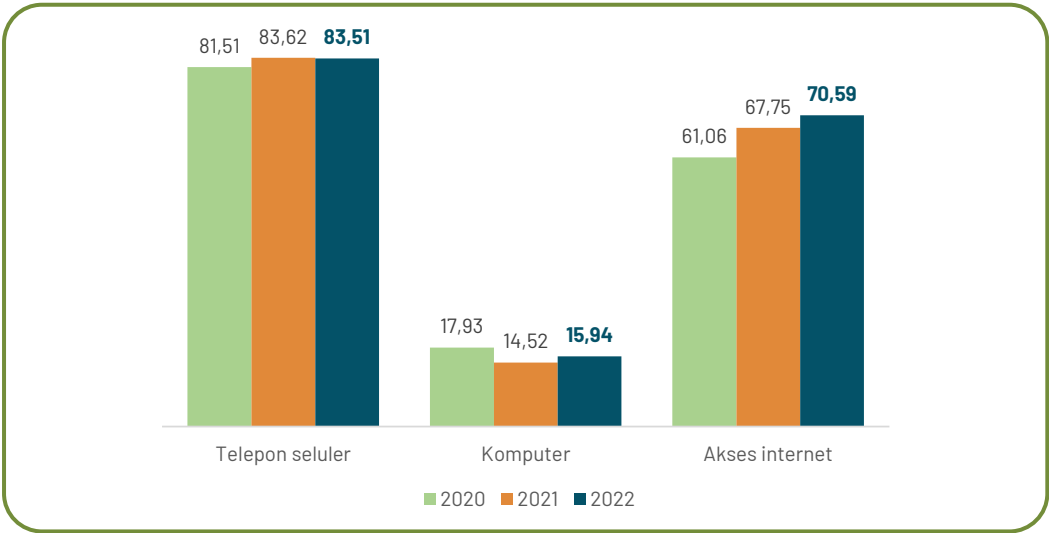
Dalam upaya mendukung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pembukaan usaha baru dan pengembangan usaha yang produktif, berinvestasi untuk kesehatan dan pendidikan, serta mengatur resiko saat terjadi guncangan ekonomi, bantuan kredit menjadi salah satu instrumen yang dapat diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta seperti bank dan koperasi. Beberapa kredit yang dapat diterima oleh rumah tangga, di antaranya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit dari bank umum

selain KUR, kredit dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kredit dari koperasi, perorangan dengan bunga, pegadaian, perusahaan *leasing*, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pinjaman online, dan lainnya. Pada periode 2020-2022, persentase rumah tangga yang menerima kredit mengalami penurunan, dari yang sebesar 35,62 persen pada tahun 2020 menjadi 31,11 persen pada tahun 2022. Penurunan penerima kredit tersebut dapat dikaitkan dengan semakin pulihnya ekonomi di Bali pasca pandemi, sehingga rumah tangga dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengajukan kredit. Jika dilihat lebih detail, dari rumah tangga yang menerima kredit, sebesar 40,54 persennya merupakan KUR. Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Bangli merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga penerima kredit terbesar, yaitu 45,73 persen pada tahun 2022.

Akses Terhadap Informasi dan Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan komunikasi dan mencari informasi dalam kesehariannya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa kita kepada era digital yang membuat akses dalam berkomunikasi dan mencari informasi menjadi semakin mudah dan cepat. Perkembangan penggunaan TIK dapat dilihat dari penggunaan telepon seluler/*handphone*, komputer, dan akses internet.

Gambar 8.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bali, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022

Tabel 8.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bali, 2022

Kabupaten/Kota	Alat Komunikasi dan Informasi		
	Telepon seluler	Komputer	Akses internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Jembrana	89,53	10,57	70,10
Tabanan	75,73	12,72	66,16
Badung	85,83	27,03	79,68
Gianyar	80,69	17,62	67,28
Klungkung	78,70	13,09	65,85
Bangli	75,09	13,01	62,66
Karangasem	75,32	5,66	54,08
Buleleng	83,57	7,83	59,91
Denpasar	91,32	20,84	84,51
Provinsi Bali	83,51	15,94	70,59

Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022

Telepon menjadi salah satu alat komunikasi yang lumrah dimiliki oleh masyarakat. Perkembangan telepon saat ini sudah sebagian besar menggunakan teknologi seluler/nirkabel, beralih dari telepon kabel yang semakin ditinggalkan karena alat komunikasi tersebut dirasa kurang praktis dan tidak dapat digunakan secara mobile. Selama periode 2020-2022, persentase penduduk Bali yang menggunakan telepon seluler dalam tiga bulan terakhir dapat dikatakan meningkat, dari yang awalnya sebesar 81,51 persen di tahun 2020 menjadi 83,51 persen di tahun 2022, meskipun sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021. Kota Denpasar memiliki persentase pengguna telepon seluler terbesar, yaitu 91,32 persen (Tabel 8.2).

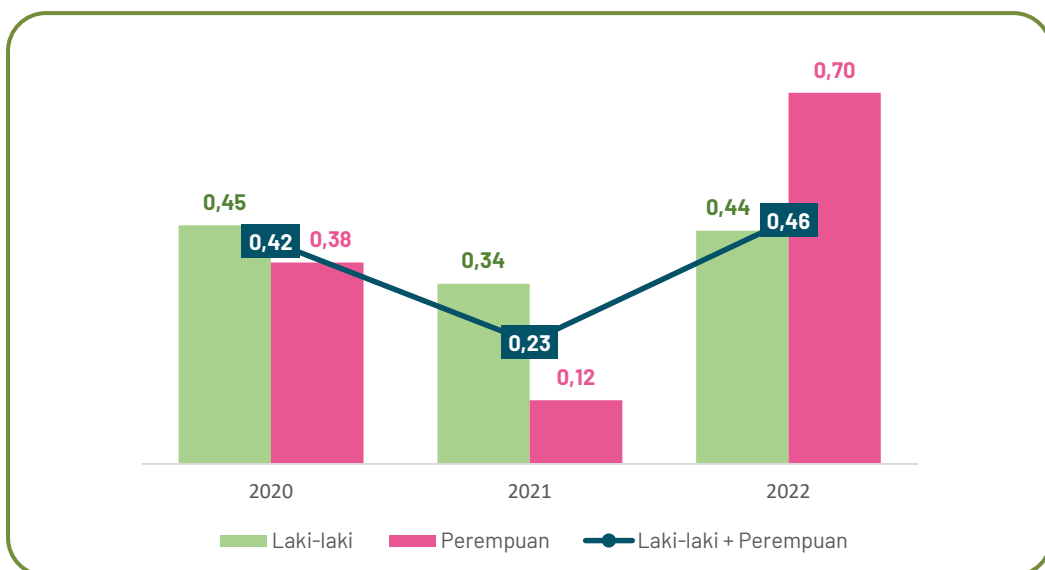
Berbeda dengan telepon seluler, pengguna komputer cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk yang menggunakan komputer dalam tiga bulan terakhir sebesar 17,93 persen pada tahun 2020 dan menjadi sebesar 15,94 persen di tahun 2022. Meskipun kondisi tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, penggunaan komputer yang menurun dapat dikaitkan dengan aspek kepraktisan, di mana komputer dirasa tidak lebih praktis dibandingkan dengan telepon seluler yang mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan tempat. Komputer yang dimaksud adalah *personal computer (PC)/desktop*, laptop, dan tablet atau komputer genggam sejenisnya. Penggunaan komputer terbanyak di tahun 2022 terdapat di Kabupaten Badung (27,03 persen) dan Kota Denpasar (20,84 persen).

Dampak dari Pandemi Covid-19 mempercepat era transformasi digital yang mengharuskan masyarakat bekerja, belajar, dan menjalankan usaha secara daring, seperti penggunaan *video conference*, *e-learning*, *e-commerce*, dan lainnya. Sehingga, mau tidak mau, masyarakat perlu menggunakan produk digital dan mengakses internet. Peningkatan jumlah pengguna internet yang semakin pesat juga tidak lepas dari keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Peningkatan ini dapat terlihat dari peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet pada periode 2020-2022, dari 61,06 persen pada tahun 2020, menjadi 67,75 persen pada tahun 2021 dan 70,59 persen pada tahun 2022. Kota Denpasar juga menjadi wilayah dengan persentase penduduk yang mengakses internet terbesar, yaitu 84,51 persen.

Korban Tindak Kejahatan

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Kejahatan dari indikator ini mencakup pencurian, penganiayaan, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan lainnya. Persentase penduduk Bali yang pernah menjadi korban kejahatan pada tahun 2022 sebesar 0,46 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,23 persen, serta lebih tinggi dari tahun 2020 yang sebesar 0,42 persen.

Gambar 8.3 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Bali, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2022



Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki pada tahun 2022. Kondisi ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya, dimana persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan. Dibandingkan dengan tahun 2021, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan baik penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut lebih tinggi terjadi pada penduduk perempuan yaitu sebesar 0,58 persen poin, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 0,10 persen poin.

Peningkatan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2022 perlu mendapatkan perhatian bersama. Peningkatan tersebut bisa jadi mengindikasikan berkurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan penurunan upaya preventif dalam keamanan masyarakat. Terlebih peningkatan yang terjadi pada penduduk perempuan, yang lebih rentan terhadap tindak kejahatan.

<https://bali.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M. dan Mujahid, G. *UNFPA Indonesia Monograph Series No. 1: Indonesia on the Threshold of Population Ageing*. Jakarta: UNFPA Indonesia, 2014.
- Badan Pusat Statistik. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. *Analisis Tematik Kependudukan Provinsi Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023.
- Baum, Fran, Connie Musolino, Hailay Abrha Gesesew, dan Jennie Popay. "New perspective on why women live longer than men: An exploration of power, gender, social determinants, and capitals." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 2 (2021): 661.
- Christiani, Charis, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono. "Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah." *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 3, no.1 (2014):102-114.
- Heryanah, Heryanah. "Ageing population dan bonus demografi kedua di Indonesia." *Populasi* 23, no. 2 (2015): 1-16.
- Mantra, Ida Bagoes. *Demografi Umum Edisi II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- OECD. "Fertility." Dalam *OECD Factbook 2015-2016: Economic, Environmental and Social Statistics*. Paris: OECD Publishing, 2016.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development (11th Ed.)*. New York: Pearson, 2012.
- UNESCO. *Adult and Youth Literacy: National, Regional and Global Trends, 1985-2015*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2013.
- Zimmerman, Carle C. "Ernst Engel's law of expenditures for food." *The Quarterly Journal of Economics* 47, no. 1(1932): 78-101.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar 80226

Telp.: (0361) 238159, Fax.: (0361) 238162

Email: bps5100@bps.go.id

Homepage: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2654-6639



9 772654 663009